

**KEBIJAKAN WEBSITE DESA TERHADAP PENYEBARAN
INFORMASI PEMBANGUNAN DI GAMPONG LAMPEUDAYA
KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

LENA RIANI
NIM. 150802029

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lena Riani
NIM. : 150802029
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

A R - R A N I R Y



Lena Riani
LENA RIANI

NIM. 150802029

**KEBIJAKAN WEBSITE DESA TERHADAP PENYEBARAN
INFORMASI PEMBANGUNAN DI GAMPONG LAMPEUDAYA
KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN
ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

LENA RIANI

NIM. 150802029

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Muhammad Thalal, LC., M.SI., M.ED
NIP.197810162008011011

Rizkika Lhena Darwin, MA
NIP.198812072018032001

**KEBIJAKAN WEBSITE DESA TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI
PEMBANGUNAN DI GAMpong LAMPEUDAYA KECAMATAN DARUSSALAM
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

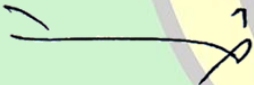
Pada Hari: Sabtu, 25 Juli 2020


di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Sekretaris

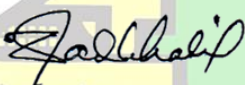

Muhammad Thalal, L.C., M.SI., M.Ed
NIP. 197810162008011011


Rizkika Lhena Darwin, MA
NIP. 198812072018032001

Penguji I


Penguji II


Dr.S.Amirul Kamal, MM., M.SI
NIP. 196110051982031007


Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.SI
NIDN.2019119001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP. 19730723000032002

ABSTRAK

Pekembangan teknologi menuntut penyesuaian tata kelola pemerintahan, termasuk pemerintah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada bab IX bagian ketiga pasal 86 tentang desa mengatur tersedianya website desa dalam mendukung pelayanan publik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik juga mendukung adanya transparansi dalam pelayanan publik. Namun keberadaan website desa belum mendukung optimalisasi pembangunan desa. Maka penelitian ini ingin menjelaskan tentang; *pertama*, tentang bagaimana kebijakan website desa di Gampong Lampeudaya berpengaruh terhadap penyebaran informasi pembangunan. *Kedua*, apa peluang dan tantangan Pemerintah Gampong Lampeudaya dalam implementasi kebijakan website desa terhadap penyebaran informasi pembangunan. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi di Gampong Lampeudaya. Hasil penelitian ini menjelaskan beberapa hal, yaitu: *pertama* kebijakan penggunaan website desa ini masih memerlukan evaluasi yang lebih lanjut, hal tersebut dikarenakan tidak semua masyarakat memanfaatkan dan menggunakan website desa tersebut. *Kedua*, adanya peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Gampong Lampeudaya tersebut, seperti aparatur desa yang sudah mengetahui cara mengelola website desa, dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah gampong dalam mengimplementasikan website desa yaitu tidak semua masyarakat mengerti tentang website desa tersebut. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah hadirnya website desa di Gampong Lampeudaya tersebut belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat dan masih adanya tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah Gampong Lampeudaya.

Kata kunci: Evaluasi, Website Desa.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kebijakan Website Desa Terhadap Penyebaran Informasi Pembangunan Di Gampong Lampeudaya Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh besar”. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis telah banyak menerima bimbingan, saran, motivasi, dan doa dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, peeliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Warul Walidin, Ak, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
2. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Eka Januar, M.SOC,SC selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Cut Zamharira, S.IP., M.AP selaku Dosen Penasehat Akademik.

5. Bapak Muhammad Thalal, LC., M.SI., M.ED selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah memberikan petunjuk, saran, dan kritik dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Rizkika Lhena Darwin, MA selaku Dosen Pembimbing kedua telah memberikan petunjuk, saran, dan kritik dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, khususnya Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu dan perhatiannya kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan hingga selesainya skripsi ini,
8. Skripsi ini teristimewa penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Sulaiman dan ibunda Cut Mutia Sahara, juga kepada saudara kandung penulis, Raihanul dan Suhendar yang selalu menyemangati dan membantu proses penyusunan skripsi ini, serta keluarga besar dari ayahanda dan ibunda yang telah memberikan dukungan berupa doa, nasihat maupun materi dalam proses perkuliahan dan juga penulisan skripsi ini, juga kepada sahabat-sahabat penulis, Mera Hafnidar, Cut Asnelida, Try Kurnia, dan Rahmatul Fitri yang selalu mendukung dan memberikan kritik serta sarannya.
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman Prodi Studi S-1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah mendukung dan memberikan kritik dan sarannya selama pengerjaan skripsi ini juga kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 31 Agustus 2020
Penulis,

Lena Riani
NIM. 15080202



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

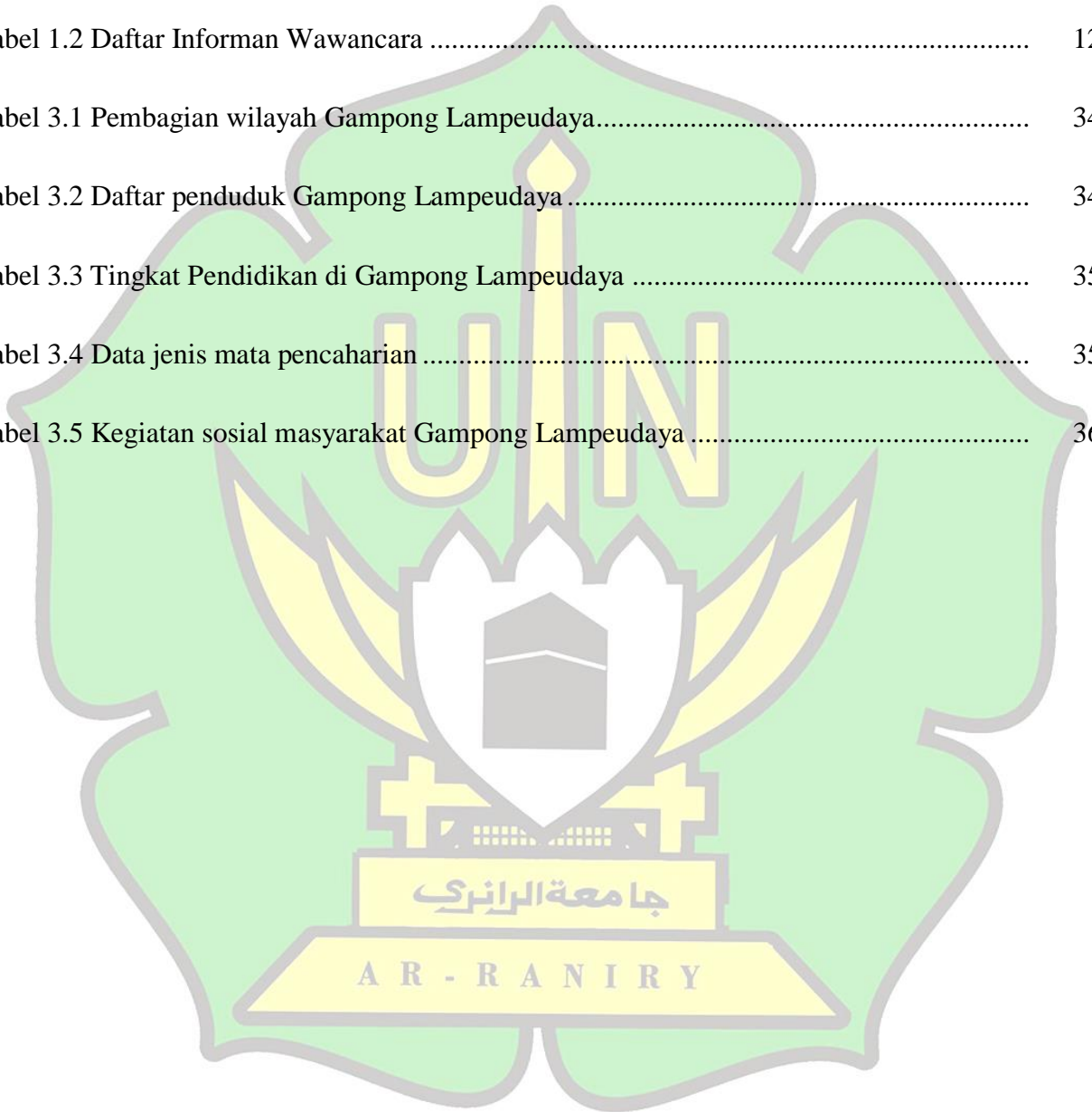
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

| | |
|---------------------------------|-------------|
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.1 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 4 |
| 1.5 Kajian Pustaka..... | 5 |
| 1.6 Metode Penelitian..... | 8 |
| 1.6.1 Jenis Penelitian | 8 |
| 1.6.2 Lokasi Penelitian | 9 |
| 1.6.3 Sumber Data | 9 |

| | |
|--|-----------|
| 1.6.4 Teknik Pengumpulan Data | 11 |
| 1.6.5 Teknik Analisa Data..... | 13 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 15 |
| 2.1 Kebijakan Publik..... | 15 |
| 2.2 Evaluasi Kebijakan Publik | 18 |
| 2.3 Website Desa..... | 27 |
| BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN | 32 |
| 3.1 Profil Gampong Lampeudaya | 32 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN | 38 |
| 4.1 Kebijakan Pemerintah Gampong Lampeudaya terkait Website desa..... | 38 |
| 4.2 . Peluang dan Tantangan Website Desa | 51 |
| BAB V PENUTUP 54 | |
| 5.1 Kesimpulan..... | 54 |
| 5.2 Saran | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 57 |

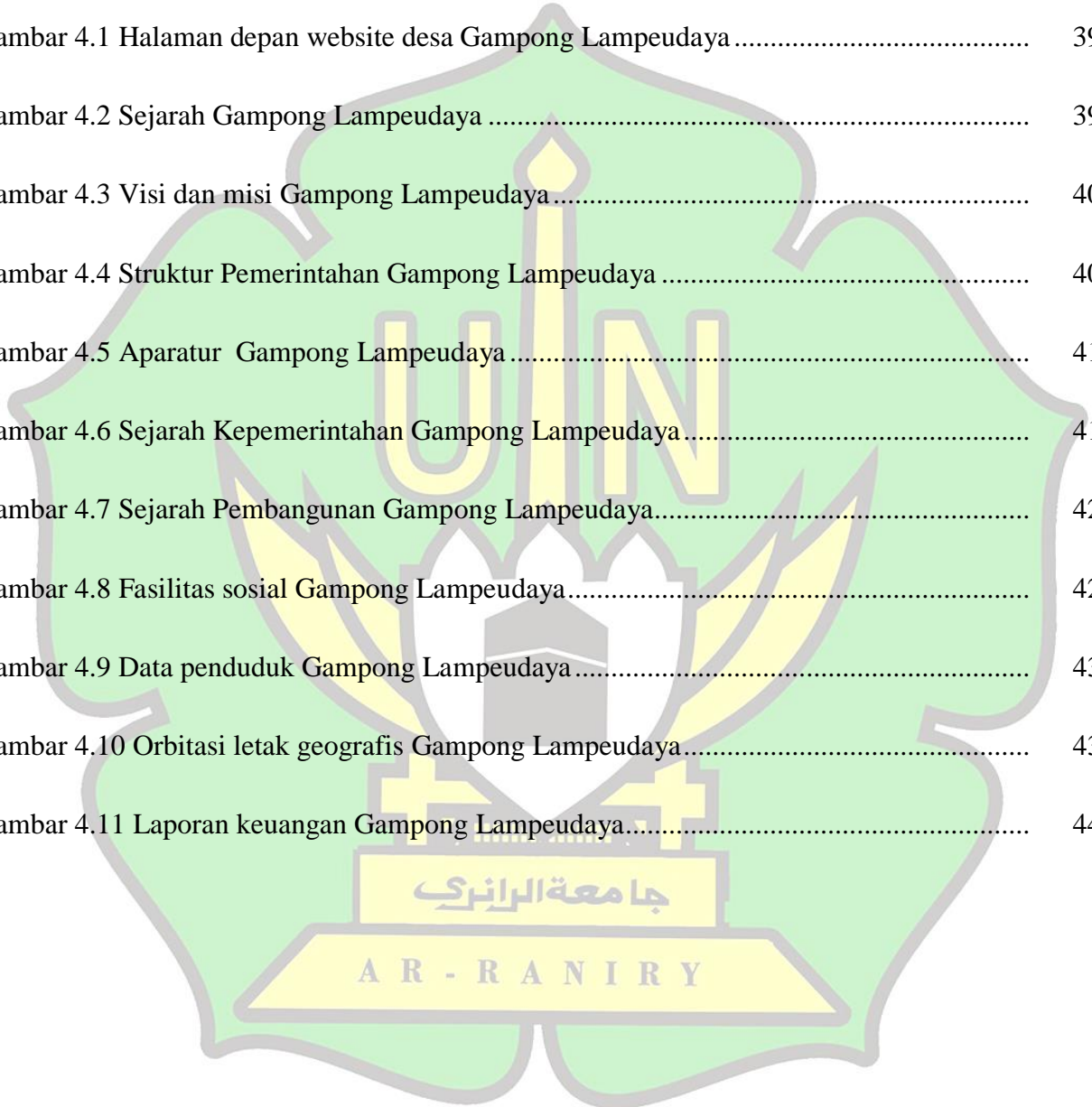
DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Informan Penelitian | 10 |
| Tabel 1.2 Daftar Informan Wawancara | 12 |
| Tabel 3.1 Pembagian wilayah Gampong Lampeudaya..... | 34 |
| Tabel 3.2 Daftar penduduk Gampong Lampeudaya..... | 34 |
| Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan di Gampong Lampeudaya | 35 |
| Tabel 3.4 Data jenis mata pencaharian..... | 35 |
| Tabel 3.5 Kegiatan sosial masyarakat Gampong Lampeudaya..... | 36 |



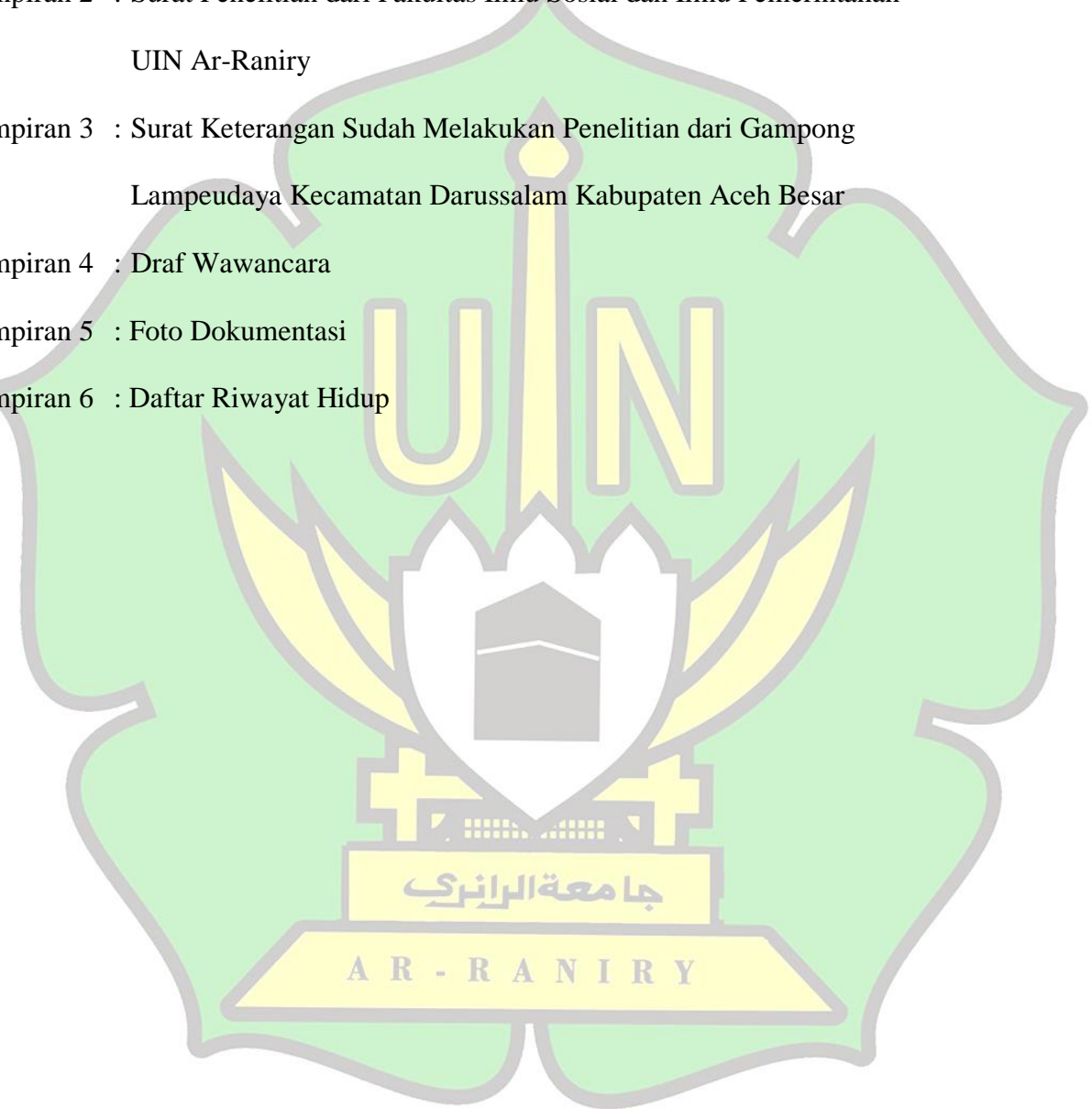
DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian | 33 |
| Gambar 4.1 Halaman depan website desa Gampong Lampeudaya | 39 |
| Gambar 4.2 Sejarah Gampong Lampeudaya | 39 |
| Gambar 4.3 Visi dan misi Gampong Lampeudaya..... | 40 |
| Gambar 4.4 Struktur Pemerintahan Gampong Lampeudaya | 40 |
| Gambar 4.5 Aparatur Gampong Lampeudaya..... | 41 |
| Gambar 4.6 Sejarah Kepemerintahan Gampong Lampeudaya..... | 41 |
| Gambar 4.7 Sejarah Pembangunan Gampong Lampeudaya..... | 42 |
| Gambar 4.8 Fasilitas sosial Gampong Lampeudaya..... | 42 |
| Gambar 4.9 Data penduduk Gampong Lampeudaya..... | 43 |
| Gambar 4.10 Orbitasi letak geografis Gampong Lampeudaya..... | 43 |
| Gambar 4.11 Laporan keuangan Gampong Lampeudaya..... | 44 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Pembimbing Tahun Akademik 2018/2019
- Lampiran 2 : Surat Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian dari Gampong
Lampeudaya Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
- Lampiran 4 : Draf Wawancara
- Lampiran 5 : Foto Dokumentasi
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini.

Perkembangan dunia teknologi yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Demikian juga ditemukannya formulasi-formulasi baru kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Ringkas kata kemajuan teknologi saat ini benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia.¹

Perkembangan teknologi informasi dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyaknya fasilitas kemudahan-kemudahan yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi secara langsung berdampak kepada kegiatan pemerintah, salah satu dampak dari teknologi informasi ini adalah pada tata kelola pemerintah desa. Pada

¹ Dwiningrum, S. I.A Ilmu sosial & budaya dasar, 2012, hlm. 71

kenyataannya kualitas pelayanan publik masih butuh perbaikan dan peningkatan dalam kualitas pelayanannya. Dengan adanya sebuah sistem informasi desa berbasis web yang diterapkan di instansi pemerintah desa maka masyarakat akan dengan mudah mengakses informasi terkait dengan kegiatan pelayanan yang diberikan pemerintah desa seperti informasi mengenai program yang akan dan telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, jumlah penduduk desa, pendapatan dan pengeluaran desa, dan sebagainya.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memiliki pertimbangan utama bahwa desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu implikasi dari penerapan UU Desa No. 6 Tahun 2014 adalah adanya alokasi anggaran dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tersebut dapat dipergunakan untuk pembangunan berbagai sektor kehidupan di desa sesuai dengan kondisi geografis, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Untuk beberapa desa, dana tersebut nantinya akan dialokasikan untuk peningkatan kualitas sistem informasi dan manajemen informasi data dalam rangka tertib administrasi, publikasi potensi desa, serta memberikan informasi seputar desa kepada masyarakatnya. Website desa merupakan salah satu bagian dari sebuah sistem informasi desa, yang berfungsi sebagai media informasi, sarana publikasi dan media interaksi antara aparat desa dengan masyarakat luas.

Website Desa telah diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pada Bab IX bagian ketiga pasal 86 yang menyatakan bahwa:

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
4. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
5. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Salah satu desa yang turut memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi adalah Desa Lampeudaya. Desa Lampeudaya menggunakan website desa sebagai media informasi bagi warganya sekaligus untuk mempromosikan potensi-potensi desa yang dimiliki agar diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, pemerintah Desa Lampeudaya juga memanfaatkan teknologi informasi lain selain website desa, seperti *Facebook*, *Twitter* dan *E-mail*. Hal itu dilakukan untuk memajukan desanya. Keberhasilan dari pemanfaatan teknologi tersebut juga selalu dibagikan melalui website desa, yang dapat diakses melalui www.lampeudaya.web.id. Dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, di website ini juga tersedia informasi mengenai kependudukan dan anggaran desa.

Berdasarkan hasil survei awal, diperoleh informasi bahwa masyarakat Gampong Lampeudaya belum sepenuhnya mengetahui adanya website desa. Selain itu juga website desa di Gampong Lampeudaya juga sudah kurang aktif dalam memberikan informasinya kepada masyarakat. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat desa juga menyebabkan masyarakat tidak mengakses informasi tentang gampong melalui website desa tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kebijakan Website Desa Di Gampong Lampeudaya Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Terhadap Penyebaran Informasi Pembangunan”**.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana kebijakan penggunaan website desa di Gampong Lampeudaya berpengaruh terhadap penyebaran informasi pembangunan ?
- b. Apa peluang dan tantangan pemerintah Gampong Lampeudaya dalam implementasi kebijakan penggunaan website desa terhadap penyebaran informasi pembangunan ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah kebijakan penggunaan website desa di Gampong Lampeudaya berpengaruh terhadap penyebaran informasi pembangunan.
- b. Untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan penggunaan website desa terhadap penyebaran informasi pembangunan.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Akademik yaitu: dapat menjadi sebuah ilmu pengetahuan, menambah wawasan, dan menjadi sumber untuk menulis karya ilmiah bagi penulis lainnya di Akademik.

- b. Bagi Pemerintah yaitu: Pemerintah dapat terus memberikan ruang dan arahan bagi masyarakat serta sebagai data dan informasi yang berguna bagi semua .
- c. Bagi masyarakat umum yaitu: Dapat menjadi panduan dan masukan, untuk terus meningkatkan efektivitas website desa terhadap penyebaran informasi desa.

1.5 Kajian Pustaka

Penelitian pertama dilakukan oleh Siska Mulyawati yang berjudul Efektivitas Website Desa Sebagai Media Penyebaran Informasi Pembangunan Di Desa Malasari Kabupaten Bogor. Tujuan penelitian ini yakni untuk;

1. Menganalisis karakteristik pengakses website, dimensi-dimensi kualitas website, peran internet opinion leader, dan efektivitas website desa;
2. Menganalisis hubungan antara peran internet opinion leader dengan dimensi-dimensi kualitas website;
3. Menganalisis hubungan antara karakteristik pengakses website dengan efektivitas website desa;
4. Menganalisis hubungan antara dimensi-dimensi kualitas website dengan efektivitas website desa;
5. Menganalisis hubungan antara peran internet opinion leader dengan efektivitas website desa

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis statistik inferensial, dan Uji Beda (T-Test). Pengumpulan data menggunakan metode survei dengan menyebarkan equestionnaire kepada 40 pengakses website dari dua kelompok sub-populasi yaitu anggota aktif Facebook akun Pewarta Desa Malasari dan pengisi kolom komentar pada website.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakses website sebagian besar berusia antara 18-35 tahun, berjenis kelamin pria, memiliki pendidikan formal sarjana, bekerja sebagai wiraswasta, memiliki penghasilan antara Rp. 1 Juta – Rp. 3 Juta, dan kurang dari sekali seminggu mengakses website malasari.desa.id. Dimensi-dimensi kualitas website berdasarkan model WebQual 4.0 berada pada kategori tinggi dan cukup. Peran internet opinion leader paling banyak dilakukan melalui sharing tautan informasi website, dan efektivitas website desa pada kategori cukup. Karakteristik pengakses website dan peran internet opinion leader tidak memiliki hubungan nyata dengan efektivitas website desa. Dimensi-dimensi kualitas website memiliki hubungan nyata dengan efektivitas website desa, kualitas informasi (information quality) memiliki hubungan yang lebih kuat dibanding kegunaan (usability) dan kualitas interaksi (interaction quality) terhadap efektivitas website desa, terutama pada efek kognitif. Temuan lain menunjukkan terdapat dua akun yang berperan sebagai internet opinion leader yang aktif yaitu akun Facebook *Pewartasari Desa Malasari* dan *Aji Panjalu*. Hasil uji beda menunjukkan perbedaan hanya terjadi pada efek afektif, dimana sampel pada kelompok anggota Facebook yang aktif lebih mengalami perubahan sikap terutama terkait rasa suka terhadap tampilan informasi pada website. Website Desa Malasari dapat efektif sebagai media penyebaran informasi pembangunan dengan memenuhi dimensi-dimensi kualitas website. Peran internet opinion leader menjadi penting guna meningkatkan perkembangan isu-isu pembangunan dan popularitas website. Penggunaan media sosial menjadi penting dalam menunjang keberadaan website desa, sehingga dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat hubungannya dengan efektivitas komunikasi.²

² Siska Mulyawati, *Efektivitas Website Desa Sebagai Media Penyebaran Informasi Pembangunan Di Desa Malasari Kabupaten Bogor*.2016 Sekolah Pascasarjana Insitiut Pertanian Bogor, diakses pada tanggal 18 Maret

Penelitian kedua dilakukan oleh Andi Arfian yang berjudul Analisa Efektivitas dan Kepuasan Pengguna Website Kecamatan Jonggol. Dalam melaksanakan sistem informasi diperlukan perencanaan yang baik. Selanjutnya, untuk membuat perencanaan yang baik membutuhkan informasi dan data yang akurat dan aktual, baik untuk informasi umum maupun kualitatif. Aparat administratif desa membutuhkan fasilitas informasi yang luas. Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis pemanfaatan informasi Berbasis Web yaitu website untuk masyarakat desa di kecamatan jonggol. Dalam menganalisis penulis menggunakan metode Delone dan McLean dalam menganalisis tingkat pemanfaatan dan kepuasan dengan menggunakan metode PLs sam. Dan dari hasil penelitian masih banyak kekurangan dan kebutuhan yang harus diperbaiki salah satunya masih terbayang informasi dari penduduk di kabupaten jonggol dan diharapkan kedepannya dapat menjadi dasar informasi dalam pengembangan informasi yang lebih interaktif dan bermanfaat untuk warga desa di kecamatan Jonggol kabupaten Bogor.³

Penelitian ketiga dilakukan oleh Andreas Andoyo dan Ahmad Sujarwadi yang berjudul Sistem Informasi Berbasis Web Pada Desa Tresnomaju Kecamatan Negerikaton Kab. Pesawaran. Dalam era yang sangat modern ini masyarakat dituntut untuk mengetahui dan mengerti perkembangan tentang pentingnya teknologi yang ada. Teknologi memberikan kemudahan untuk membantu setiap kegiatan manusia baik dunia akademik, pembangunan dan lain sebagainya terutama dibidang pemerintahan (E-government). E-government didefinisikan

2019 pada situs <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/82863>

³Andi Arfian, Analisa Efektivitas dan Kepuasan Pengguna Website Kecamatan Jonggol, 2017, Program Studi Sistem Informasi STMIK Nusa Mandiri Jakarta, diakses pada tanggal 18 Maret 2019 pada situs www.politeknikmeta.ac.id/meta/ojs/index.php/inkofar/article/.../12.

sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dimana pemanfaatan teknologi komunikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Suatu penyampaian informasi menggunakan sebuah aplikasi berbasis web akan lebih mudah dalam menerapkan e-government pada Desa Tresnomaju. Pada saat ini Desa Tresnomaju masih menggunakan sistem manual yang pada akhirnya masyarakat tidak dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan setiap saat, sehingga banyak sekali informasi yang tidak diketahui. Untuk meningkatkan kualitas suatu layanan data dan informasi, sebuah aplikasi website sangatlah dibutuhkan. Mengacu pada hal tersebut, maka diharapkan Desa Tresnomaju menggunakan Sistem informasi berbasis Web dengan tujuan agar dapat mempublikasikan ke masyarakat luas serta memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan setiap saat hanya dengan menggunakan komputer yang sudah terkoneksi oleh internet.⁴

Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana kebijakan website desa terhadap penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat dan didalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai apakah masyarakat mengetahui segala informasi setelah adanya website desa tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan,

⁴ Andreas Andoyo, M.T.I., Ahmad Sujarwadi, *Sistem Informasi Berbasis Web Pada Desa Tresnomaju Kecamatan Negerikato, Kabupaten Pesawaran, 2014* STMIK Pringsewu, diakses pada tanggal 13 Desember 2018 pada situs <https://ojs.stmikpringsewu.ac.id>.

persepsi, pemikir secara individual atau kelompok.⁵ Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis terkait dengan objek yang diteliti dengan memberikan informasi dan data yang valid terkait dengan fenomena yang ada dilapangan. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih peneliti guna menggali informasi seluas-luasnya mengenai kebijakan website desa sebagai media penyebaran informasi pembangunan desa.

1.6.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Gampong Lampeudaya Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Alasan memilih lokasi ini karena kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar adalah salah satu Kecamatan yang berbatasan dengan kota Banda Aceh yang merupakan Ibukota Provinsi Aceh dan juga Kecamatan Darussalam berbatasan dengan universitas-universitas terkemuka di Aceh. Di Kecamatan Darussalam yang sudah mempunyai website desa yaitu Desa Berabung, dan Desa Lampeudaya⁶ Dalam penelitian ini peneliti mengambil Gampong Lampeudaya sebagai objek penelitian karena informasi dalam website desa yang disediakan lebih lengkap dan juga jumlah penduduk di Gampong Lampeudaya ini lebih banyak, sehingga pemerintah desa membuat website desa sebagai media penyebaran informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu peneliti tertarik ingin melihat sejauh mana penggunaan website desa di Gampong Lampeudaya tersebut. Penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2019.

1.6.3 Sumber Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Menurut Wester's New World Dictionary, data berarti sesuatu yang diketahui atau dianggap. Dengan demikian ini berarti bahwa data dapat memberikan gambaran tentang

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 2006, hlm. 133

⁶ Berdasarkan survey awal penulis dengan sekretaris desa.

suatu keadaan atau persoalan baik terkait dengan tempat dan waktu. Jenis Sumber Data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan.⁷ Data primer diperoleh peneliti melalui wawancara mendalam dan observasi. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah Purposive Sampling. Purposive sample adalah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tetentu. Adapun yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Informan Penelitian

| No | Informan | Keterangan | Jumlah |
|----|-------------------------------|---|---------|
| 1 | Keuchik Gampong Lampeudaya | Sebagai penanggungjawab website desa dan pengelola website desa | 1 orang |
| 2 | Sekretaris Gampong Lampeudaya | Sebagai pembantu pengelola website desa | 1 orang |
| 3 | Masyarakat Gampong Lampeudaya | Sebagai penerima manfaat kebijakan website desa | 7 orang |

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber kedua data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, atau data sekunder adalah data yang berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca,

⁷ Saifuddin, Azwar. Metode Penelitian, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm, 91

mendengarkan, dan melihat.⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah skripsi, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan website desa. Data ini dapat diperoleh dan dikumpulkan dengan mudah dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi hasil penelitian ini, penulis memerlukan data sebagai pendukung keseluruhan terhadap penulisan proposal ini dalam mencari dan mengumpulkan data-data tersebut penulis menggunakan teknik - teknik sebagai berikut :

a. Observasi;

Observasi atau pengamatan merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi non-partisipan yang dimana peneliti tidak terlibat dan hanya menjadi pengamat independen. Peneliti melakukan observasi dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai website desa di Gampong Lampeudaya Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

b. Wawancara;

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.¹⁰ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan peneliti yang terlebih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancaranya nanti.¹¹ Informan dalam penelitian ini terdiri dari: aparaturnya gampong Lampeudaya berjumlah dua orang yaitu keuchik dan sekretaris gampong, serta

⁸ *Ibid*, hlm.91

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Administrasi,..., hlm. 156

¹⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2004, hlm. 180

¹¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*,..., hlm. 107.

masyarakat berjumlah 7 orang. Adapun daftar informan wawancara dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1.2 Daftar Informan Wawancara

| No | Nama Informan | Jabatan | Keterangan |
|----|-------------------|--------------------|---|
| 1 | Bapak Fauzan | Keuchik Gampong | Penanggungjawab website desa dan pengelola website desa |
| 2 | Bapak Syarifuddin | Sekretaris Gampong | Pembantu pengelola website desa |
| 3 | Bapak M. Riza | Masyarakat | Penerima kebijakan website desa |
| 4 | Bapak Mukhlis | Masyarakat | Penerima kebijakan website desa |
| 5 | Bapak Anwar | Masyarakat | Penerima kebijakan website desa |
| 6 | Ibu Asnita | Masyarakat | Penerima kebijakan website desa |
| 7 | Ibu Maria | Masyarakat | Penerima kebijakan website desa |
| 8 | Ibu Rosni | Masyarakat | Penerima kebijakan website desa |
| 9 | Ibu Yuliana | Masyarakat | Penerima kebijakan website desa |

c. Dokumentasi.

Yaitu sebuah metode pengambilan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan judul penelitian. Misalnya dengan menggunakan penelusuran dan penelaahan bahan-

bahan pustaka berupa buku-buku, surat kabar, majalah, catatan, transkrip, kebudayaan dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan judul penelitian.¹²

1.6.5 Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang mana yang penting, dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹³ Dalam analisis data deskriptif kualitatif mencakup:

a. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstrasi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis.¹⁴ Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan, reduksi data juga dapat pula membantu memberikan kode kepada aspek tertentu. Reduksi data yang peneliti lakukan adalah dengan memilih dan mengurutkan data berdasarkan banyaknya informan yang menyebutkan masalah tersebut, kemudian peneliti buat dalam sebuah narasi lalu peneliti sederhanakan dengan memilih hal-hal yang sejenis agar mudah dalam menyajikannya.

b. Penyajian Data

¹² Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, 2004, hlm. 274

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2013, hlm. 335

¹⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2018, hlm. 244

Penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengabilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks naratif. Penyajian naratif perlu diengkapi dengan berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semua itu dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.¹⁵ Dalam penelitian ini, penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mudah mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsisi.¹⁶ Kesimpulan juga diverifikasi sebagai hasil analisis data. Makna yang muncul dari data harus diuji agar menjadi masuk akal, kokoh, data diterima, dan inilah yang disebut validitas.¹⁷ Penarikan kesimpulan berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 248

¹⁶ *Ibid*, I hlm. 249

¹⁷ *Ibid*, hlm. 252

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada distruktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut akan membingungkan. Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijakan merupakan penjawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Kebijakan publik adalah semacam jawaban suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya).

Kebijakan publik dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan

¹⁸ Syafie, Inu Kencana, Ilmu Administrasi Publik, 2006, hlm.104

dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.¹⁹

Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N Dunn adalah sebagai berikut;

1. Tahap Penyusunan Agenda

Sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah pada agenda-agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan, karena tidak semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan

¹⁹ Keban, Yermias, T. 2004, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teroi dan Isu. hlm. 55

masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai tindakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk pemecahan masalah tersebut.

3. Tahap adopsi kebijakan

Berbagai macam alternatif yang ditawarkan oleh para aktor perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang memobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini muncul berbagai kepentingan yang akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementor*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini,

memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik tersebut telah meraih dampak yang diinginkan.

Dilihat dari uraian diatas mengenai tahapan pembuatan kebijakan publik, maka dapat dimengerti bahwa evaluasi kebijakan memegang peranan penting dalam tahapan kebijakan publik. Mengingat banyaknya masalah-masalah yang ada dalam masyarakat tentunya juga membutuhkan pemecahan masalah yang tepat dan sesuai kondisi masyarakat yang ada.

2.2 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk melihat apakah suatu kebijakan atau program yang dibuat tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.²⁰

Evaluasi kebijakan sangat penting dalam menilai suatu kebijakan publik. Karena evaluasi mempunyai fungsi yang membuat suatu kebijakan perlu di evaluasi. Dalam analisis kebijakan bahwa evaluasi memiliki beberapa fungsi penting antara lain:

1. Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan serta tujuan yang telah

²⁰ Dunn, William N, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahann), edisi kedua2003, hlm, 608

dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target.

2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga mengkritik dengan menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepastian tujuan dan sasaran, dapat menguji alternatif sumber nilai (misalnya, kelompok kepentingan dan pegawai negeri, kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomi, legal, social, substantif)
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada defenisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.²¹

Evaluasi kebijakan publik memiliki tipe dan pendekatan yang beragam dan berbeda, tergantung dari pada tujuan ataupun sudut pandang dari para evaluator yang akan melakukan evaluasi. Menurut William N Dunn membagi pendekatan evaluasi menjadi tiga bagian antara lain:

²¹ *Ibid*, hlm. 608-609

a. Evaluasi semu

Adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial.

b. Evaluasi Formal

Merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hal tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

c. Evaluasi keputusan teoritis

Adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Asumsi dari evaluasi teoritis keputusan adalah bahwa tujuan dan sasaran dari perilaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal maupun tersembunyi merupakan ukuran yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan dan program.

Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

1. Fokus nilai.

Evaluasi merupakan suatu usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan sasaran itu sendiri.

2. Interpedensi fakta nilai

Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya hasil-hasil kebijakan berharga bagi semua individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.

3. Orientasi masa kini dan masa lampau

Tuntutan evaluatif berbeda dengan tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan. Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan.

4. Dualitas nilai

Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada, dan dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempunyai tujuan-tujuan lain). Nilai yang sering ditata

di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan yang relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.²²

Evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William Dunn menginformasikan bahwa evaluasi tidak sekedar mengumpulkan informasi mengenai kebijakan yang dapat diantisipasi dan yang tidak diantisipasi, tetapi evaluasi diarahkan untuk memberi informasi pada masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang. Selain itu evaluasi kebijakan diarahkan untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) bagi semua individu, kelompok dan masyarakat apabila adanya aksi-aksi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Dalam menghasilkan informasi mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut, digunakanlah tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan, yaitu:

1. Efektivitas: apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
2. Efisiensi: seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3. Kecukupan: seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah ?
4. Pemerataan: apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok berbeda ?
5. Responsivitas: apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu ?
6. Ketetapan: apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ?

²²*Ibid*, , hlm. 608-609

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yaitu keberhasilan dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.²³

Jika suatu kebijakan telah dilaksanakan namun ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang ada dimasyarakat, maka bisa dikatakan kebijakan tersebut tidak berhasil. Tetapi ada juga hasil dari suatu kebijakan yang efektif dalam jangka panjang sehingga membutuhkan waktu yang lama. Menurut Mahmudi mengartikan bahwa efektivitas yang merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.²⁴

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan diatas, maka efektivitas ini diartikan sebagai suatu standar dalam menilai suatu kebijakan akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu juga menunjukkan sejauh mana organisasi, pogram/kegiatan atau kebijakan tersebut terlaksana sesuai fungsi-fungsinya secara optimal.

b. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Efektivitas adalah keberhasilan kita dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, sedangkan efisiensi adalah penggunaan

²³ *Ibid*, hlm. 429

²⁴ Mahmudi, 2005, Manajemen Kinerja Sektor Publik, hlm. 92

sumber daya yang dilakukan secara optimal sehingga tujuan dari kebijakan tersebut tercapai. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan keberhasilan pada kebijakan yang telah ditetapkan. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.²⁵

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik adalah untuk melihat apakah tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan tersebut merasa tercukupi dalam segala hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.²⁶ Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Dalam hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:

²⁵Dunn, William N, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahann), edisi kedua2003, hlm. 430

²⁶*Ibid*, hlm. 430

1. Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.
2. Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
3. Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
4. Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.²⁷

Dari penjelasan masalah tipe-tipe diatas, dapat diketahui bahwa masalah yang terjadi dari suatu kebijakan termasuk pada salah satu dari keempat tipe masalah tersebut. Maka dapat diartikan bahwa sebelum suatu kebijakan itu dirumuskan harus dilakukan analisis masalah yang terjadi di tengah masyarakat sebagai suatu sasaran yang akan dicapai, sehingga bisa dirumuskan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

d. Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.²⁸ Kebijakan yang berorientasi pada

²⁷ *Ibid*, hlm. 430-431

²⁸ *Ibid*, hlm. 434

perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Pelaksanaan kebijakan haruslah bersifat adil dalam arti semua sektor dan dari segi lapisan masyarakat harus sama-sama dapat menikmati hasil kebijakan. Karena pelayanan publik merupakan pelayanan dari birokrasi untuk masyarakat dalam memenuhi kegiatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan publik sendiri menghasilkan jasa publik.

e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik merupakan suatu respon atau tanggapan terhadap suatu aktivitas dan kebijakan yang telah ditetapkan, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.²⁹

²⁹ Dunn, William N, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahann), edisi kedua 2003, hlm. 437

f. Ketepatan

Ketetapan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah: “kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.”³⁰

Artinya ketetapan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Kriteria-kriteria evaluasi diatas menjelaskan bahwa suatu evaluasi kebijakan publik diukur dengan melihat efektivitas program, efisiensi program, kecukupan, responsivitas masyarakat terhadap program dan kebijakan, serta ketetapan program tersebut dalam menangani masalah yang terjadi didalam masyarakat.

2.3 Website Desa

Desa merupakan daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan rumah tangganya sendiri. Merujuk pada Undang-Undang Desa Pasal 1 bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengelola rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul maupun hak tradisionalnya. Pasal ini juga menjelaskan bahwa desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

³⁰ *Ibid*, hlm. 439

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Amanat pada pasal tersebut menjadikan desa berdaulat untuk mengelola sumberdayanya sendiri. Sejalan dengan hadirnya keterbukaan informasi publik bagi masyarakat tingkat desa, salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan desa adalah merancang, melaksanakan dan melaporkan penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber daya desa harus diketahui secara terbuka oleh masyarakat. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dikuatkan pula oleh pasal 82 UU Desa, yang menyatakan bahwa menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

Penggunaan sistem informasi untuk membantu kinerja pemerintah desa menjadi lebih baik, lebih efisien dan lebih mudah. Dengan didukung oleh kemajuan teknologi informasi, telah memungkinkan pengembangan sistem informasi yang semakin handal. Informasi merupakan salah satu sumber daya penting dalam manajemen modern. Banyak keputusan strategis bergantung pada informasi. Penataan informasi yang dilakukan secara teratur, jelas, tepat, dan cepat serta dapat disajikan dalam aplikasi dan laporan tentunya sangat mendukung kelancaran kegiatan operasional pemerintah desa. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah desa bisa berinteraksi dan bertukar informasi dengan warga, sehingga mampu memperlancar jalannya pemerintah desa didalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat.³¹

Layanan informasi desa melalui website merupakan salah satu cara bagi pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kepada seluruh perangkat desa, masyarakat, organisasi desa dan komunitas-komunitas yang ada di desa dengan cepat dan mudah. Selain itu, masyarakat juga

³¹ Desi Susilowati, Paryanta, *Website Desa Jetis untuk membantu mengelola data penduduk dan dana desa*, 2015, STMIK AUB Surakarta, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa melalui layanan informasi desa untuk pengembangan desa kearah yang lebih baik.

Instansi pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Desa memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 82, yang menyatakan bahwa:

1. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi desa mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa
2. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa
3. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
4. Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Website desa adalah suatu portal atau situs berbasis online yang didalamnya terdapat informasi publik seputar kegiatan desa, baik dari segi administrasi, sosial, budaya, kelembagaan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan desa tersebut. Dengan tujuan menyediakan informasi yang akurat agar diketahui oleh khalyak sekitar kegiatan desa tersebut, juga bertujuan untuk mengenalkan potensi desa tersebut. Singkatnya, Website Desa adalah situs online yang didalamnya menyuguhkan informasi seputar desa terkait, dengan harapan adanya keterbukaan informasi dan bertujuan untuk mengenalkan Desa pada publik.

Munculnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadikan lembaga pemerintahan, instansi milik pemerintahan, dan badan publik wajib memenuhi hak masyarakat akan informasi publik. Hak masyarakat akan informasi publik merupakan hak asasi yang fundamental dan sudah terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem informasi desa bertujuan membuka akses informasi pada tingkat desa. Pengembangan sistem informasi desa ini diwujudkan melalui website pemerintah desa. Website yang dibuat harus memuat informasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 86 ayat 4 UU Desa, yaitu :

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah/Kota
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan
3. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
4. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan
5. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh pemerintah desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk desa.

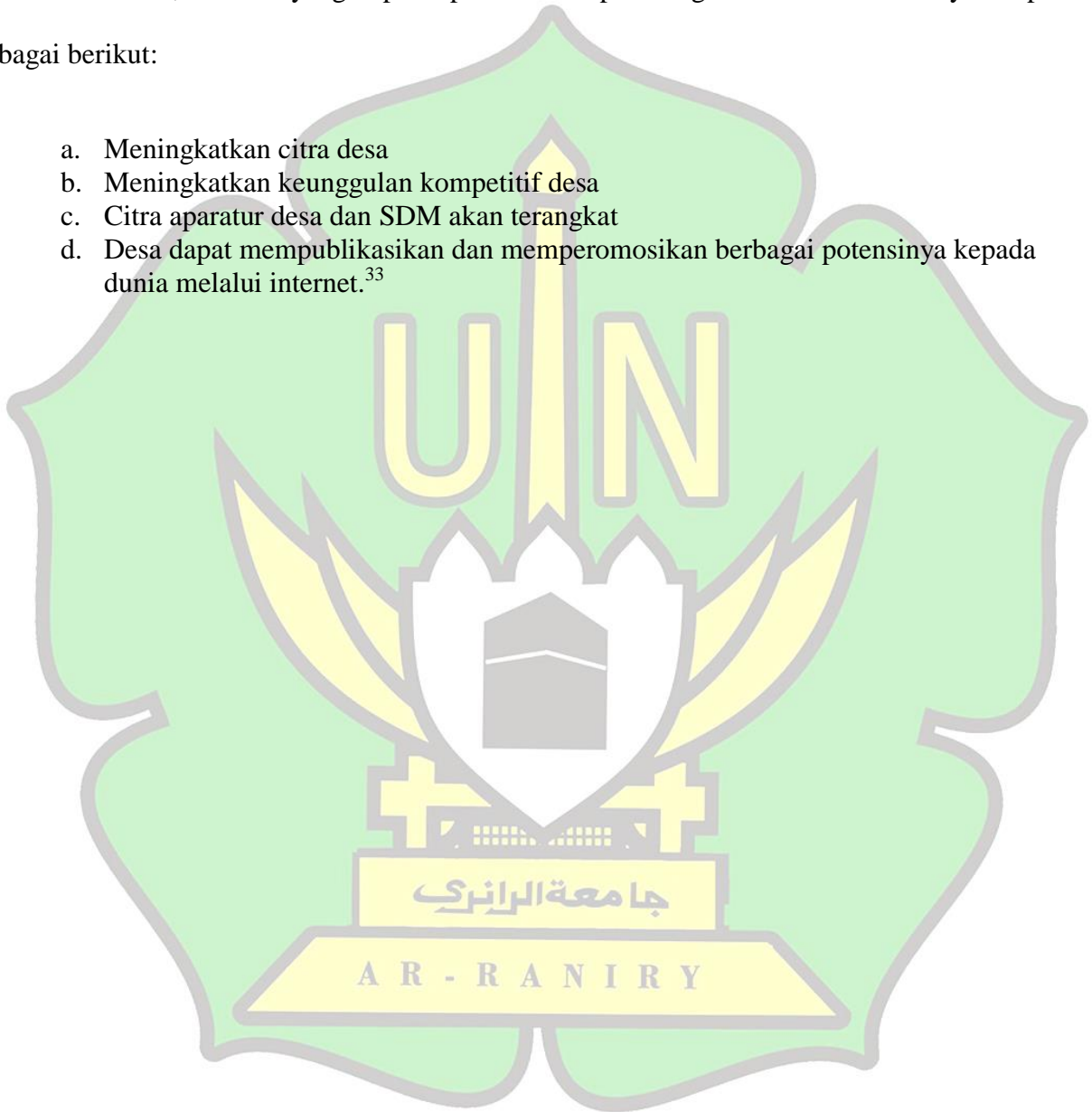
Sistem informasi desa ini dikelola oleh pemerintah desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa maupun *stakeholder* terkait. Adapun tujuan yang dapat diperoleh dari pembangunan website desa adalah sebagai berikut:

- a. Publikasi keberadaan Desa ke Indonesia bahkan Internasional
- b. Menginformasikan profil dan seluruh potensi desa
- c. Mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai Desa, sebagai bentuk keterbukaan informasi publik
- d. Masyarakat dapat memberikan dan mendapatkan informasi dengan cepat tanpa hambatan apapun, dalam rangka percepatan pembangunan desa
- e. Program-program Desa, foto-foto kegiatan desa, video pun dapat diakses diseluruh dunia
- f. Pengumuman desa, dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat desa yang ada diseluruh Indonesia bahkan yang sedang merantau keluar negeri

- g. Berita terkini program desa, dapat memberikan informasi kepublik berbagai aktivitas pembangunan desa sehingga bisa bersinergi dengan gerak langkah pembangunan di kabupaten/kota setempat
- h. Layanan pembuatan surat online, sebagai wujud pelayanan prima yang dilakukan oleh desa.³²

Selain itu, manfaat yang dapat diperoleh dari pembangunan website desa layanan publik sebagai berikut:

- a. Meningkatkan citra desa
- b. Meningkatkan keunggulan kompetitif desa
- c. Citra aparatur desa dan SDM akan terangkat
- d. Desa dapat mempublikasikan dan mempromosikan berbagai potensinya kepada dunia melalui internet.³³



³² Prabowo Aji Sumitro, Ramdhan Bara, dkk, Mengelola Website Desa Menggunakan Aplikasi CMS Wordpress, 2017, hlm. 1

³³ *Ibid*, hlm. 2

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

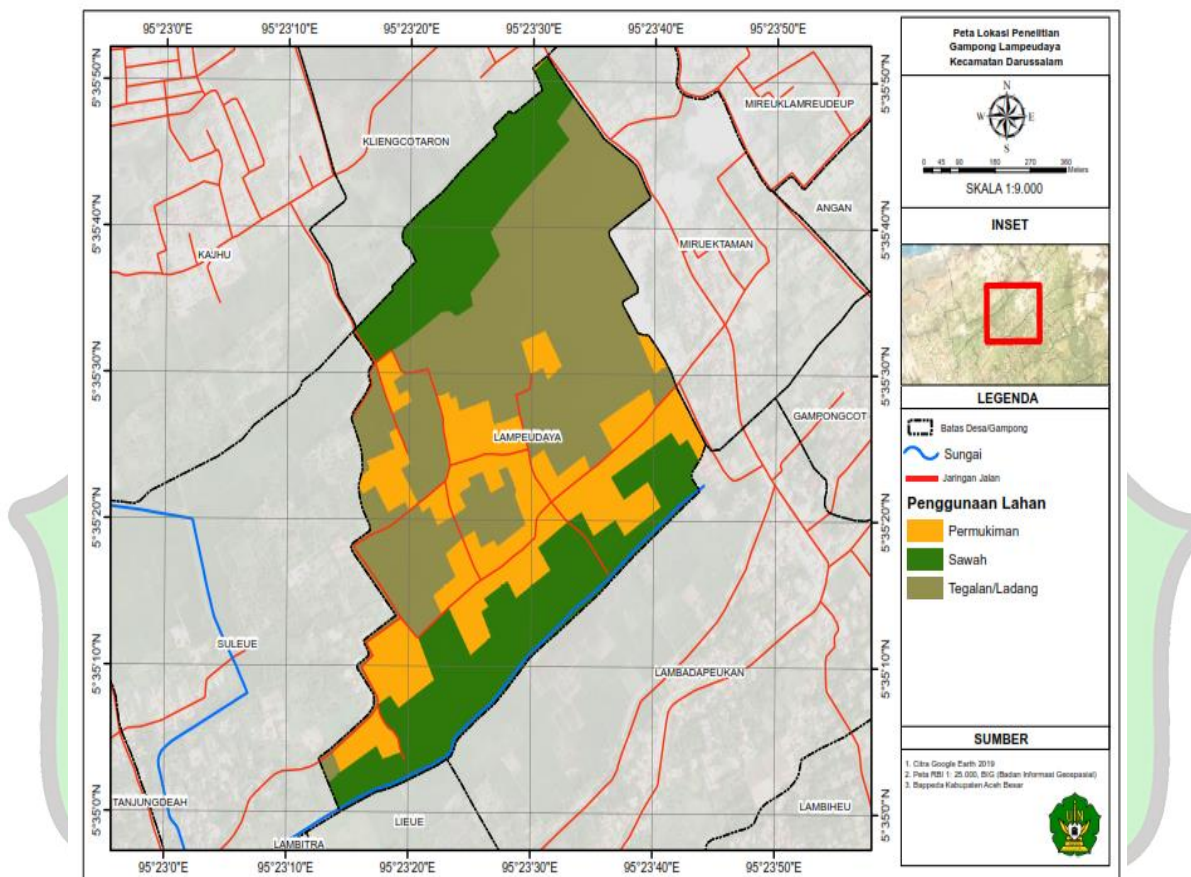
3.1 Profil Gampong Lampeudaya Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Gampong Lampeudaya merupakan salah satu gampong yang berada di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Gampong Lampeudaya merupakan perpaduan dari dua buah kata, yaitu “Lam” dan “Peudaya”. “Lam” berarti “dalam” sedangkan “Peudaya” artinya “memperdayai/mempengaruhi”. Sehingga arti dari kata “Lampeudaya” adalah dalam memperdayai. Secara historis, nama Gampong Lampeudaya berasal dari kejadian seekor ular naga. Di mana menurut cerita secara turun temurun, dahulu ada seekor ular naga yang bersuara sangat keras di Gampong tetangga, yaitu Gampong Suleu yang suaranya terdengar sampai ke Gampong Lampeudaya. Ular naga itu hendak dibunuh oleh masyarakat Suleu, kemudian menyingkir ke Gampong Lampeudaya.

Masyarakat Gampong Lampeudaya mencari solusi untuk membunuh ular tersebut dengan cara memperdaya ular tersebut dengan racun, yaitu diracuni dengan kapur sirih sehingga ular tersebut menjadi tak terkendali dan melarikan diri ke sawah. Sampai di sawah ular naga tersebut akhirnya mati akibat reaksi dari racun kapur sirih tersebut. Maka sejak kejadian itu orang-orang tua Gampong Lampeudaya sepakat untuk memberi nama Gampong mereka dengan sebutan Gampong Lampeudaya.

Nama ini timbul karena masyarakat Lampeudaya sudah berhasil memperdayai ular naga yang besar dan ganas tersebut hingga mati. Kemudian dari tahun ke tahun hingga beralih generasi nama Gampong ini masih terkenal dengan sebutan Lampeudaya karena dapat

memperdayai seekor ular naga. Berdasarkan peristiwa yang sangat bersejarah itulah sampai saat ini masih bernama Gampong Lampeudaya.³⁴



Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian

*Sumber: Citra Google Earth 2019
Peta RB 1:25.000 BIG (Badan Informasi Geospasial)
Bappeda Kabupaten Aceh Besar*

Gampong Lampeudaya termasuk wilayah kemukiman Lambaro Angan, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Secara administrasi dan geografis Gampong Lampeudaya berbatasan dengan Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam di sebelah Utara, Gampong Miruek Taman kecamatan Darussalam di sebelah Timur, Gampong Suleu Kecamatan Darussalam di sebelah Barat dan Gampong Lambada Peukan Kecamatan Darussalam di sebelah Selatan. Adapun pembagian wilayah Gampong Lampeudaya keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

³⁴ Lampeudaya.web.id

Tabel 3.1 Pembagian Wilayah Gampong Lampeudaya

| No | Pemanfaatan Lahan | Luas Lahan (ha) |
|----|---------------------------------|-----------------|
| 1 | Area Pusat Gampong | 2 |
| 2 | Area Pemukiman | 15 |
| 3 | Area Pertanian | 30 |
| 4 | Area Perkebunan | 22 |
| 5 | Area Pendidikan | 1 |
| 6 | Area Industri | 5 |
| 7 | Area Perdagangan | 1 |
| 8 | Area Pusat Pelayanan Masyarakat | 0,02 |
| 9 | Area Rekreasi dan Olah Raga | 0,02 |
| 10 | Area Saluran Pembuangan | 0,17 |
| 11 | Saluran Irigasi | 0,01 |
| 12 | Jalan/Lorong | 0,03 |
| 13 | Jembatan dan gorong-gorong | 0,04 (8 unit) |

Sumber data: www.Lampeudaya.web.id tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa gampong Lampeudaya merupakan suatu gampong yang sumber pendapatan masyarakatnya bertumpu dari hasil pertanian, dikarena area pertanian yang luasnya hampir setengah dari area pemukiman. Adapun jumlah keseluruhan penduduk gampong Lampeudaya adalah sebanyak 777 jiwa. Hal ini dapat dilihat dari tabel jumlah penduduk menurut Dusun dibawah ini:

Tabel 3.2 Daftar Penduduk Lampeudaya

| No | Nama Dusun | Jumlah KK | Jumlah Jiwa | | Total Jiwa |
|-----------|----------------|-----------|-------------|-----|------------|
| | | | LK | PR | |
| 1 | Gampong Leun | 73 | 105 | 131 | 236 |
| | a. Hadrah II | 5 | 6 | 11 | 17 |
| | b. Grand I | 6 | 11 | 5 | 16 |
| | c. Grand II | 5 | 6 | 8 | 14 |
| | d. Grand IV | 1 | | 2 | 2 |
| Sub Total | | 90 | 128 | 157 | 285 |
| 2 | Meunasah Blang | 72 | 128 | 138 | 266 |
| | Grand III | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Sub Total | | 73 | 129 | 139 | 268 |
| 3 | Cot Seurioh | 35 | 68 | 67 | 135 |
| | a. Hadrah III | 17 | 34 | 30 | 64 |

| | | | | | |
|--|------------------|-----|-----|-----|-----|
| | b. Anisa Monsion | 7 | 13 | 12 | 25 |
| | Sub Total | 59 | 115 | 109 | 224 |
| | | | | | |
| | Sub Total | 222 | 372 | 405 | 777 |

Sumber: Dokumentasi Profil Gampong tahun 2019

Selain itu, berikut ini gambaran mengenai pendidikan di Gampong Lampeudaya yaitu:

Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan di Gampong Lampeudaya

| No | Jenjang Pendidikan | Persentase |
|----|--------------------|------------|
| 1 | SD | 20% |
| 2 | SMP | 35% |
| 3 | SMA | 26% |
| 4 | S1 | 7% |

Sumber: Dokumentasi Profil Gampong tahun 2018

Sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, tukang dan buruh bangunan, pembuat batu bata, pedagang, banyak juga masyarakat gampong Lampeudaya yang bekerja di sektor usaha ekonomi lainnya seperti: usaha warung kopi, jual beli sembako/kelontong, usaha peterenakan dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Data Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Lampeudaya

| No | Jenis Pekerjaan | Persentase |
|----|--|------------|
| 1 | Petani <ul style="list-style-type: none"> • Petani Pangan dan Perkebunan | 35% |
| 2 | Peternak <ul style="list-style-type: none"> • Peternak Unggas • Peternak Sapi, Kambing, Kerbau | 7% 10% |
| 3 | Aparatur Sipil Negara | 5% |
| 4 | Buruh Batu Bata | 30% |
| 5 | Tukang Bangunan | 15% |
| 6 | Wiraswasta/Pedagang | 8% |
| 7 | Supir | 3% |

Sumber Data: Dokumentasi Profil Gampong 2018

Tingkat perekonomian masyarakat Gampong Lampeudaya sudah terbilang cukup. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai buruh batu bata dan petani dengan penghasilan Rp 500.000-1.000.000/bulan. Di Gampong Lampeudaya terdapat 30 pabrik batu bata. Dalam meningkat tingkat perekonomiannya, para wanita atau istri juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Di Gampong Lampeudaya, hubungan sosial antar masyarakatnya masih terjalin dengan baik. Berikut ini disajikan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-hari:

Tabel 3.5 Kegiatan Sosial Masyarakat

| No | Golongan | Jenis Kegiatan Sosial |
|----|-------------|---|
| 1. | Ibu-ibu | <ul style="list-style-type: none"> a. Gotong royong b. Pengajian rutin (wirid yasin) c. Takziah ke tempat orang meninggal d. Berkunjung ke tempat orang sakit atau melahirkan |
| 2. | Bapak-bapak | <ul style="list-style-type: none"> a. Gotong royong b. Bersama-sama melakukan fardhu kifayah jika ada warga yang meninggal dunia serta takziah ke tempat orang meninggal c. Berkunjung ke tempat orang sakit |
| 3. | Pemuda | <ul style="list-style-type: none"> a. Gotong royong b. Melakukan takziah ke tempat orang meninggal dunia c. Pengajian rutin (Dalail Khairat) d. Berkunjung ke tempat orang sakit e. Persatuan olah raga |

Sumber data: Dokumentasi Profil Gampong

Hubungan pemerintah dengan masyarakat juga terjalin sangat baik, hal ini menjadi kekuatan Gampong Lampeudaya dalam pengelolaan pemerintahan dan kemasyarakatan, salah satunya dapat dilihat dari adanya administrasi pemerintahan gampong yang cukup baik, serta berfungsinya struktur pemerintahan gampong itu sendiri.

Gampong Lampeudaya mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Terciptanya Gampong Lampeudaya yang aktif, kreatif serta produktif dalam mengembangkan usaha pertanian dan perindustrian masyarakat yang berkualitas dan bermutu untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai serta religius.

2. Misi

- a. Bidang infrastruktur/sarana dan prasarana; Menyediakan sarana dan prasarana/infrastruktur untuk menunjang perekonomian masyarakat Gampong Lampeudaya
- b. Bidang ekonomi; Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Gampong (PAG) dan sumber pendapatan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dalam rangka menunjang perkembangan gampong secara berkelanjutan
- c. Bidang pendidikan dan sosial budaya; Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan lembaga/kelompok di gampong untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan gampong
- d. Bidang pelayanan umum Menciptakan dan meningkatkan pembangunan gampong yang partisipatif dan transparan
- e. Bidang kesehatan Menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan menciptakan lingkungan hidup yang bersih, aman, dan nyaman.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kebijakan Pemerintah Gampong Lampeudaya Terkait Website Desa

Keterbukaan informasi publik sudah mulai diterapkan secara merata mulai dari tingkat nasional, regional, dan lokal melalui infrastruktur yang mendukung pelaksanaannya. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Selain itu juga terdapat pada pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik.

Keterbukaan informasi publik pada di tingkat desa dimulai pada tahun 2014, atas dasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-Undang Desa mengamanatkan pada aspek pengelolaan desa yang diharapkan dapat mendorong kemajuan desa dengan mengoptimalkan potensi desa tersebut. Salah satu kewajiban adalah merancang, melaksanakan, dan melaporkan penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber daya desa. Semua kegiatan tersebut dituntut untuk dapat diakses dengan mudah oleh publik.

Salah satu contoh implementasi keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi desa terjadi pada salah satu desa di Kabupaten Aceh Besar yakni Gampong Lampeudaya. Di gampong tersebut sudah mempunyai website desa yang diluncurkan pada akhir tahun 2016.



Gambar 4.1 Halaman Depan Website Desa Gampong Lampeudaya

Sumber: www.lampeudaya.web.id

Berikut ini beberapa informasi yang ada pada website desa Gampong Lampeudaya, yaitu:

a. Sejarah Gampong Lampeudaya



Gampong Lampeudaya merupakan perpaduan dari dua buah kata, yaitu "Lam" dan "Peudaya". "Lam" berarti "dalam" sedangkan "Peudaya" artinya "memperdayai/mempengaruhi". Sehingga arti dari kata "Lampeudaya" adalah dalam memperdayai. Secara historis, nama Gampong Lampeudaya berasal dari kejadian seekor ular naga. Di mana menurut cerita secara turun temurun, dahulu ada seekor ular naga yang bersuara sangat keras di Gampong tetangga, yaitu Gampong Suleu yang

Gambar 4.2 Sejarah Gampong Lampeudaya

Sumber: www.lampeudaya.web.id

b. Visi dan Misi Gampong Lampeudaya

Visi dan Misi Gampong Lampeudaya

👁️ 92 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini



Visi

Terciptanya Gampong Lampeudaya yang aktif, kreatif, serta produktif dalam mengembangkan usaha pertanian dan perindustrian masyarakat yang berkualitas dan bermutu untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai serta religius.

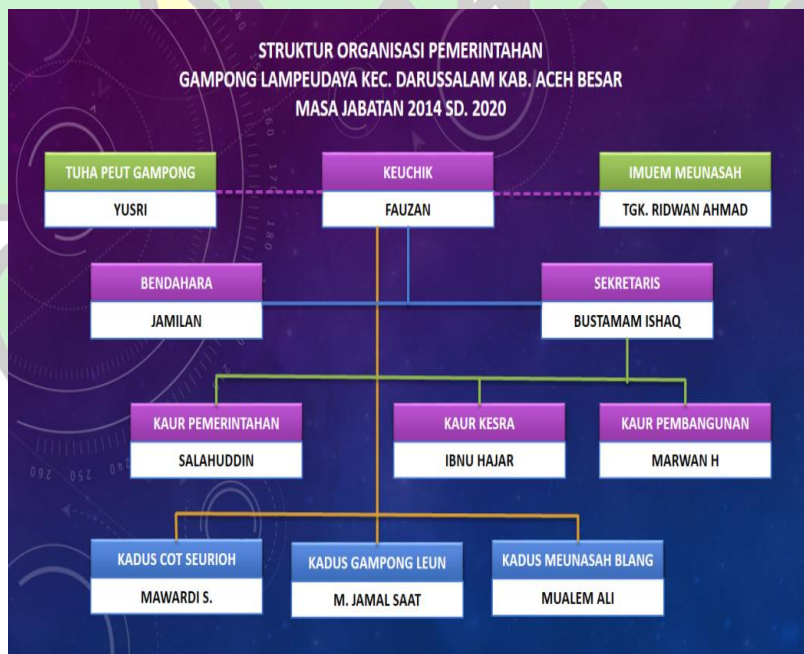
Misi

1. Bidang Infrastruktur / Sarana dan Prasarana; Meyediakan Sarana dan Prasarana / Infrastruktur untuk menunjang perekonomian masyarakat Gampong Lampeudaya
2. Bidang Ekonomi; Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Gampong (PAG) dan sumber pendapatan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dalam rangka menunjang pengembangan gampong secara berkelanjutan.
3. Bidang Pendidikan dan Sosial Budaya;

Gambar 4.3 Visi dan Misi Gampong Lampeudaya

Sumber: www.lampeudaya.web.id

c. Struktur Pemerintahan Gampong Lampeudaya




Gambar 4.4 Struktur Pemerintahan Gampong Lampeudaya

Sumber: www.lampeudaya.web.id

d. Aparatur Gampong Lampeudaya

Aparatur Gampong Lampeudaya

 64 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

| | |
|---|--|
|  | <p>Nama : Fauzan Jabatan : Keuchik Alamat : Dusun Meunasah Blang, Gampong Lampeudaya</p> |
|  | <p>Nama : Yusri Jabatan : Ketua Tuha Peut Alamat : Dusun Meunasah Blang, Gampong Lampeudaya</p> |
|  | <p>Nama : Tgk. Ridwan Ahmad Jabatan : Imuem Alamat : Dusun Gp. Leun, Gampong</p> |

Gambar 4.5 Aparatur Gampong Lampeudaya

Sumber: www.lampeudaya.web.id

e. Sejarah Pemerintahan Gampong Lampeudaya

Sejarah Pemerintahan Gampong Lampeudaya

 60 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Berikut adalah nama-nama keuchik yang pernah menjabat sebagai kepala pemerintahan di Gampong Lampeudaya :

| | |
|---|--|
|  | <p>Nama : FAUZAN Jabatan : Keuchik Periode : 2014 - Sekarang</p> |
|  | <p>Nama : A. WAHAB IS Jabatan : Keuchik Periode : 2008 - 2013</p> |
|  | <p>Nama : SOFYAN IBRAHIM Jabatan : Keuchik</p> |

Gambar 4.6 Sejarah Pemerintahan Gampong Lampeudaya

Sumber: www.lampeudaya.web.id

f. Sejarah Pembangunan Gampong Lampeudaya

Sejarah Pembangunan Gampong Lampeudaya

52 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

| NO | TAHUN | PERISTIWA / JENIS PEMBANGUNAN | SUMBER DANA | DAMPAK | SUMBER INFORMASI | KETERANGAN |
|----|-------|---|-------------|------------------------------------|-------------------|--|
| 1 | 1948 | Pembangunan Meunasah dalam bentuk rumah Aceh Melanjutkan Pembangunan Meunasah | Swadaya | Masyarakat sudah ada tempat ibadah | Perangkat Gampong | Masyarakat sebelumnya tidak memiliki tempat ibadah |

Gambar 4.7 Sejarah Pembangunan Gampong Lampeudaya

Sumber: www.lampeudaya.web.id

g. Fasilitas Sosial Gampong Lampeudaya

Fasilitas Sosial Gampong Lampeudaya

53 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini


| NO | JENIS FASILITAS | JUMLAH | PENGGUNAAN FASILITAS |
|----|-----------------------------|--------|-----------------------------------|
| 1 | FASILITAS AGAMA | | |
| | Meunasah | 1 Unit | Tempat Beribadah – Aktif |
| | Balai Pengajian | 1 Unit | Tempat Pengajian Aktif |
| 2 | FASILITAS PEMERINTAH | | |
| | Kantor Keuchik | 1 Unit | Untuk Pelayanan Masyarakat |
| | Gedung Sebaguna | 1 Unit | Untuk tempat pertemuan masyarakat |
| | Balai Desa | 1 Unit | Untuk temp pertemuan masyarakat |

Gambar 4.8 Fasilitas Sosial Gampong Lampeudaya

Sumber: www.lampeudaya.web.id

h. Data Penduduk Gampong Lampeudaya

Data Penduduk Gampong Lampeudaya

 70 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini



Berikut adalah data penduduk Gampong Lampeudaya dari tahun ke tahun :

| NO | TAHUN | JUMLAH PENDUDUK |
|----|-------|-----------------|
| 1 | 2003 | 400 jiwa |
| 2 | 2004 | 480 jiwa |
| 3 | 2005 | 490 jiwa |
| 4 | 2006 | 498 jiwa |
| 5 | 2007 | 501 jiwa |
| 6 | 2008 | 504 jiwa |
| 7 | 2009 | 507 jiwa |

Gambar 4.9 Data Penduduk Gampong Lampeudaya

Sumber: www.lampeudaya.web.id

i. Orbitasi dan Letak Geografis Gampong Lampeudaya

Kondisi Fisik, Orbitasi, Letak Geografis dan Peta Gampong Lampeudaya

 125 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini

A. KONDISI FISIK GAMPONG

| NO | PEMANFAATAN LAHAN | LUAS (HA) |
|----|---------------------------------|-----------|
| 1 | Area Pusat Gampong | 2 |
| 2 | Area Pemukiman | 15 |
| 3 | Area Pertanian | 30 |
| 4 | Area Perkebunan | 22 |
| 5 | Area Pendidikan | |
| 6 | Area Industri | 5 |
| 7 | Area Perdagangan | 1 |
| 8 | Area Pusat Pelayanan Masyarakat | 0,02 |
| 9 | Area Rekreasi dan Olah Raga | 0,02 |
| 10 | Area Saluran Pembuangan | 0,17 |
| 11 | Saluran Irigasi | 0,1 |

Gambar 4.10 Orbitasi dan Letak Geografis Gampong Lampeudaya

Sumber: www.lampeudaya.web.id

j. Laporan keuangan Gampong Lampeudaya

Laporan Keuangan Tahun 2017

 47 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

A. PENDAPATAN

| NO | SUMBER DANA | JUMLAH DANA |
|----|---|-----------------------|
| 1 | Silva Tahun 2016 | Rp 3.100.000 |
| 2 | Dana Desa Dari Pusat | Rp 736.505.000 |
| 3 | Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kota | Rp 6.472.650 |
| 4 | Alokasi Dana Gampong Kabupaten | Rp 122.814.500 |
| | TOTAL DANA | Rp 868.892.150 |

B. PENGELUARAN

| NO | KEGIATAN | BIAYA |
|----------|------------------------|-----------|
| A | PEMBANGUNAN | |
| 1 | Pembangunan Dapur Umum | Rp 47.000 |

Gambar 4.11 Laporan Keuangan Gampong Lampeudaya

Sumber: www.lampeudaya.web.id

Website desa di Gampong Lampeudaya ini mulai diluncurkan pada akhir tahun 2016 lalu. Website ini digunakan untuk memberikan informasi-informasi dan kegiatan yang dilakukan di Gampong Lampeudaya tersebut. Selain itu, dengan adanya website desa ini, pemerintah gampong sudah lebih mudah memperkenalkan gampongnya kepada masyarakat luar dan juga dengan adanya website desa ini pemerintah desa lebih transparan dalam memberikan informasi-informasi mengenai dana desa. Selain mengenai dana desa, didalam website desa ini juga ada kegiatan desa, informasi mengenai sejarah desa, struktur aparatur desa, dan lain sebagainya.

Untuk melihat dan menilai apakah kebijakan website desa tersebut sudah sesuai, maka peneliti turun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat bagaimana website desa di Gampong Lampeudaya tersebut. Hasil dari penelitian tersebut yaitu:

1. Efektivitas

Website desa di Gampong Lampeudaya belum efektif dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan kurang updatenya informasi pada website desa tersebut. Selain itu, tidak semua masyarakat mengakses website desa tersebut, masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang website desa tersebut. Seperti hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Gampong Lampeudaya berikut:

“Selama ini kalau ingin mengetahui informasi langsung ke kantor keuchik, tidak tahu mengenai website desa tersebut.”³⁵

Akan tetapi, sudah ada juga masyarakat yang mengetahui tentang website desa tersebut. Seperti hasil wawancara dengan masyarakat gampong berikut ini:

“Data yang diakses dari website desa tersebut yaitu melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilakukan, dan juga melihat mengenai anggaran dana desa, baik tahun ini maupun tahun sebelumnya. akan tetapi, mengenai anggaran dana desa untuk tahun ini belum ada di website desa. Selain itu, website desanya sudah kurang update dalam pemberian informasi”.³⁶

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Keuchik Gampong Lampeudaya, yaitu:

“Gampong Lampeudaya memiliki sistem informasi desa berupa website desa dengan nama lampeudaya.web.id Website ini diluncurkan pada akhir tahun 2016. Website ini digunakan untuk berbagi informasi seputar kegiatan desa yang berasal dari warga, oleh warga, dan untuk warga desa. Selain itu, website desa Lampeudaya digunakan sebagai media promosi desa kepada masyarakat luar. Sebagai sistem informasi desa yang baik dan sesuai amanat UU Desa, website desa Lampeudaya memberikan informasi mengenai profil desa, visi misi desa, peta lokasi desa, aparatur desa, potensi desa, arsip desa, dan agenda kegiatan desa.”³⁷

Sedangkan tujuan dari pembuatan website desa tersebut adalah agar Gampong Lampeudaya ini diketahui keberadaannya oleh masyarakat luar, seperti peneliti yang mengetahui

³⁵ Hasil wawancara dengan masyarakat gampong Bapak Mukhlis pada tanggal 14 November 2019

³⁶ Hasil wawancara dengan masyarakat gampong Bapak Muhammad Riza pada 14 November 2019

³⁷ Hasil wawancara dengan keuchik gampong Bapak Fauzan pada 11 November 2019

tentang Gampong Lampeudaya ini setelah membuka website desa tersebut. Selain itu, tujuan dari pembuatan website desa ini adalah agar desa ini lebih transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Tujuan website desa menurut keuchik gampong tersebut yaitu:

“Tujuan dari pembuatan website desa di Gampong Lampeudaya adalah agar masyarakat luar mengetahui informasi tentang Gampong Lampeudaya. Selain itu, tujuan dari website desa adalah agar pemerintah desa lebih transparan dalam memberikan informasi-informasi kepada masyarakat mengenai anggaran desa dan pembangunan desa. Diharapkan setelah adanya website desa ini, Gampong Lampeudaya menjadi gampong yang lebih baik lagi untuk kedepannya.”³⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, dapat kita lihat bahwa tujuan dari pembuatan website desa adalah agar desa lebih transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas dan masyarakat luar mengetahui Gampong Lampeudaya tersebut. Dengan adanya website desa, aparatur desa lebih transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat sekitar, salah satunya mengenai masalah pembangunan-pembangunan yang dilakukan di Gampong Lampeudaya tersebut. Keuchik Gampong Lampeudaya mengatakan bahwa :

“Dengan adanya website desa di gampong ini, masalah-masalah pembangunan seperti perbaikan jalan, perbaikan mushalla, pembangunan gapura batas gampong, rehabilitasi balai serba guna, dan lain-lain dimasukkan kedalam website desa. Hal ini membuat semua pembangunan-pembangunan yang dilakukan di Gampong Lampeudaya ini lebih terbuka kepada masyarakat karena juga tertera berapa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembangunan tersebut.”³⁹

Bagi masyarakat yang tidak mengerti internet, untuk mengetahui informasi dan pengumuman Gampong Lampeudaya, pihak aparatur desa juga sudah menyediakan papan informasi diposko jaga. Selain itu, ada juga masyarakat yang memilih langsung bertanya kepada keuchik maupun sekretaris desa, dan juga penyampaian informasi tersebut melalui mulut ke mulut yang pada umumnya sering dilakukan oleh ibu-ibu. Akan tetapi seringkali data atau informasi yang didapatkan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, jadi keuchik Gampong

³⁸ Hasil wawancara dengan Keuchik gampong Bapak Fauzan pada 11 November 2019

³⁹ Hasil wawancara dengan keuchik gampong Bapak Fauzan pada tanggal 11 November 2019

Lampeudaya menyarankan agar langsung datang ke kantor keuchik atau membuka website desa supaya data yang didapatkan lebih konkrit.

2. Efisiensi

Efisiensi tidak lepas kaitannya dengan efektivitas. Efektivitas adalah keberhasilan kita dalam menjalankan program, sedangkan efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan. Efisiensi juga berkenaan dengan biaya yang dikeluarkan dalam kebijakan tersebut. Biaya untuk pengelola website desa berasal dari anggaran desa. Seperti yang dijelaskan oleh keuchik Gampong Lmpeudaya yaitu:

"Biaya yang dikeluarkan untuk pengelola website desa ini adalah sebanyak Rp. 900.000,- pertahunnya yang mana biayanya berasal dari dana desa dan pembayarannya dilakukan pada setiap akhir tahun. Dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk website desa tersebut diharapkan agar masyarakat tidak perlu lagi ke kantor keuchik untuk mengetahui pengumuman atau informasi, masyarakat hanya perlu mengakses website desa tersebut. Selain itu, masyarakat luar juga mengetahui tentang Gampong Lampeudaya ini."⁴⁰

Biaya yang dikeluarkan untuk pengelola website desa tersebut Rp900.000/tahun, dana yang dikeluarkan tersebut berasal dari dana desa, akan tetapi hal tersebut tidak berdampak pada masyarakat, yang mana masih ada masih masyarakat yang tidak mengetahui website desa tersebut dan juga masih ada masyarakat yang ke kantor keuchik untuk mencari informasi.

3. Kecukupan

Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas yaitu mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa yang mengatakan bahwa:

"Hadirnya website ini memberikan perubahan pada pemerintahan gampong, yang mana aparatur desa atau pengelola website desa hanya perlu memasukkan data mengenai

⁴⁰ Hasil wawancara dengan keuchik gampong Bapak Fuzan pada tanggal 11 November 2019

informasi-informasi terkini yang diberikan oleh keuchik gampong. Hal tersebut berdampak baik terhadap keterbukaan informasi publik.”⁴¹

Akan tetapi, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya seperti petani dan buruh bata yang tidak mengerti mengenai website desa, seharusnya pihak aparaturnya terlebih dulu melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan website desa. Dan aparaturnya juga bisa mengajak masyarakat yang sudah mengetahui mengenai website desa tersebut untuk disosialisasikan kepada masyarakat lainnya. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan informasi yang sama. Seperti hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Gampong Lampeudaya:

“Adanya website desa di Gampong Lampeudaya ini sudah sangat bagus. Itu membuat para aparaturnya lebih transparan dalam memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Akan tetapi alangkah baiknya jika masyarakat diarahkan dulu bagaimana cara menggunakan website desa tersebut. Karena tidak semua masyarakat mengetahui tentang website desa tersebut. Hanya orang yang paham teknologi saja yang mengetahuinya.”⁴²

Apabila dilihat dari segi penyampaian informasi-informasi tentang desa, di Gampong Lampeudaya ini penyampaian informasinya sudah terbilang baik. Karena sudah sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Undang-Undang Desa yang mana dalam website desa tersebut harus mencakup mengenai sejarah desa, visi dan misi desa, anggaran dana desa dan lain sebagainya. Walaupun masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan kembali oleh aparaturnya setempat, yang mana mengenai data dana desa tahun 2018 dan tahun 2019 yang belum dimasukkan ke dalam website desa. Selain itu sosialisasi mengenai website desa juga perlu dilakukan, agar website desa tersebut dapat menjadi alternatif yang ada untuk memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

⁴¹ Hasil wawancara dengan sekretaris gampong Bapak Syarifuddin pada tanggal 12 November 2019

⁴² Hasil wawancara dengan masyarakat gampong Ibu Rosni pada tanggal 14 November 2019.

4. Pemerataan

Dalam kebijakan publik pemerataan dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Lampeudaya yang menyatakan bahwa:

“Tidak semua masyarakat dapat mengakses atau membuka website desa tersebut. Hanya masyarakat yang paham akan dunia teknologi dan internet saja yang dapat mengakses dan mengetahui mengenai website desa tersebut.”⁴³

Dapat kita lihat bahwa pemerataan mengenai website desa belum mencakup seluruh masyarakat Gampong Lampeudaya, karena masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang website desa tersebut.

5. Responsivitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat, tanggapan mereka terkait dengan kebijakan website desa tersebut sangatlah baik. Walaupun ketika diwawancara masih ada masyarakat yang tidak mengerti mengenai website desa tersebut, akan tetapi ketika dijelaskan apa itu website desa dan apa fungsinya mereka sangat setuju dengan kebijakan tersebut. Mereka sangat berharap dengan adanya website desa tersebut Gampong Lampeudaya menjadi lebih baik lagi kedepannya baik dari segi pelayanannya maupun dari segi pemberian informasinya.

Seperti dijelaskan dibawah ini yaitu hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang mengatakan bahwa:

“Adanya website desa di Gampong Lampeudaya ini sudah sangat bagus. Masyarakat bisa lebih mudah untuk mengetahui tentang kegiatan desa, informasi-informasi desa, dana desa, dan lain sebagainya.”⁴⁴

Selain itu, ada juga wawancara dengan salah satu masyarakat lainnya yang mengatakan bahwa:

⁴³ Hasil wawancara dengan keuchik gampong Bapak Fauzan pada tanggal 11 November 2019

⁴⁴ Hasil wawancara dengan masyarakat Bapak Anwar pada tanggal 15 November 2019

“Sudah bagus dengan adanya website desa di Gampong Lampeudaya ini. Akan tetapi, sangat disayangkan sekarang ketika dibuka websitenya sudah terhenti pemberitahuan-pemberitahuan mengenai kegiatan desa. Diharapkan agar kedepannya aparat desa lebih aktif lagi dalam memberikan informasi-informasi. Karena dengan adanya website desa ini, masyarakat lebih mudah mencari tahu tentang informasi desa, yang dimana masyarakat tidak perlu lagi melihat ke kantor keuchik.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat sangat mendukung hadirnya website desa di Gampong Lampeudaya tersebut. Karena dengan adanya website desa tersebut, akan mempermudah masyarakat dalam mencari informasi mengenai desa tersebut. Akan tetapi, terhadap pelayanannya masyarakat tidak terlalu puas karena kurang update nya informasi-informasi yang diberikan.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program tersebut. Ketepatan juga merujuk pada sudah tepat sasaran atau belumnya kebijakan yang dibuat tersebut. Sasaran dari pembuatan website desa tersebut adalah untuk masyarakat, agar masyarakat mengetahui tentang desa tersebut. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa sasaran dari pembuatan website desa belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Seharusnya sebelum diberlakukannya website desa di Gampong Lampeudaya tersebut, pemerintah gampong melihat dan menilai terlebih dahulu apa dan bagaimana kesiapan di gampong tersebut terhadap perkembangan teknologi dan internet tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh keuchik Gampong Lampeudaya, yaitu:

“Kesiapan masyarakat terhadap kebijakan website desa ini masih terbilang kurang, karena masyarakatnya banyak yang belum mengerti tentang teknologi dan internet.”⁴⁶

Berdasarkan penjelasan dari keuchik Gampong Lampeudaya tersebut, memang Gampong Lampeudaya menjadi lebih transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, akan

⁴⁵ Hasil wawancara dengan masyarakat Ibu Asnita pada tanggal 15 November 2019

⁴⁶ Hasil wawancara dengan keuchik gampong Bapak Fauzan pada tanggal 11 November 2019

tetapi masyarakatnya belum siap dengan perkembangan dunia teknologi yang semakin maju ini sehingga menyebabkan website desa ini seperti tidak digunakan sebagaimana semestinya.

4.2 Peluang Dan Tantangan

Dalam menjalankan kebijakan website desa tersebut tentu tidak terlepas dari peluang dan tantangan yang dihadapi. Berikut ini beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Gampong Lampeudaya:

1. Peluang

Adapun peluang dalam website desa tersebut adalah:

- a. Desa lebih transparan dalam memberikan informasi. Dengan hadirnya website desa di Gampong Lampeudaya tersebut, desa lebih transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh sekretaris desa di Gampong Lampeudaya:

“Dengan adanya website desa, masyarakat lebih mudah mengetahui tentang anggaran dan dana desa. Bukan hanya informasi pada tahun ini saja, akan tetapi juga ada informasi-informasi dana desa pada tahun sebelumnya. Selain itu, website desa juga memberikan informasi-informasi mengenai kegiatan gampong yang telah dilakukan di gampong tersebut.”⁴⁷

- b. Selain website desa, penyebaran informasi juga dipermudah dengan adanya grup *WhatsApp*. Didalam grup tersebut juga diberitahukan kepada masyarakat mengenai website desa, yang mana jika ingin lebih mengetahui informasi tentang desa yang lebih lengkap, masyarakat cukup mengakses website desa saja. Seperti hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Gampong Lampeudaya yaitu:

*“Selain website desa, di Gampong Lampeudaya ini juga mempunyai grup *WhatsApp* yang fungsinya juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dan juga melalui grup ini, pak keuchik atau sekdes memberitahukan bahwa di Gampong Lampeudaya ini sudah mempunyai website desa.”⁴⁸*

⁴⁷ Hasil wawancara dengan sekretaris gampong Bapak Syarifuddin pada tanggal 12 November 2019

⁴⁸ Hasil wawancara dengan masyarakat Ibu Maria pada tanggal 16 November 2019

- c. Aparatur desanya sudah mengerti tentang teknologi dan dunia internet. Karena berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris gampong, selain sudah dipilih siapa pengelolanya, sekretaris gampong dan juga keuchik gampong juga bisa menggunakan website desa tersebut untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Seperti hasil wawancara dengan sekretaris desa yang mengatakan bahwa website desa di Gampong Lampeudaya ini dikelola oleh keuchik gampong⁴⁹

2. Tantangan

Website desa di Gampong Lampeudaya tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi, yaitu:

- a. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah, hal tersebut tentu menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah gampong setempat yang mana apabila tingkat pendidikan masyarakatnya rendah, tentu masyarakat tersebut tidak mengetahui tentang website desa. Seperti hasil wawancara dengan sekretaris desa yaitu:

“Tingkat pendidikan masyarakat di Gampong Lampeudaya ini paling tinggi adalah setingkat SMA, itupun dalam jumlah yang sedikit. Kebanyakan masyarakat di Gampong Lampeudaya ini tingkat pendidikannya hanya sampai SMP. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat mengenai website desa di gampong ini.”⁵⁰

- b. Tidak adanya pendampingan atau penyuluhan mengenai website desa, yang mana seharusnya ini penting dilakukan. Karena dengan adanya pendampingan dan penyuluhan tersebut berfungsi sebagai bentuk pelatihan sekaligus pemahaman pada dunia internet. Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Lampeudaya yang mengatakan bahwa:

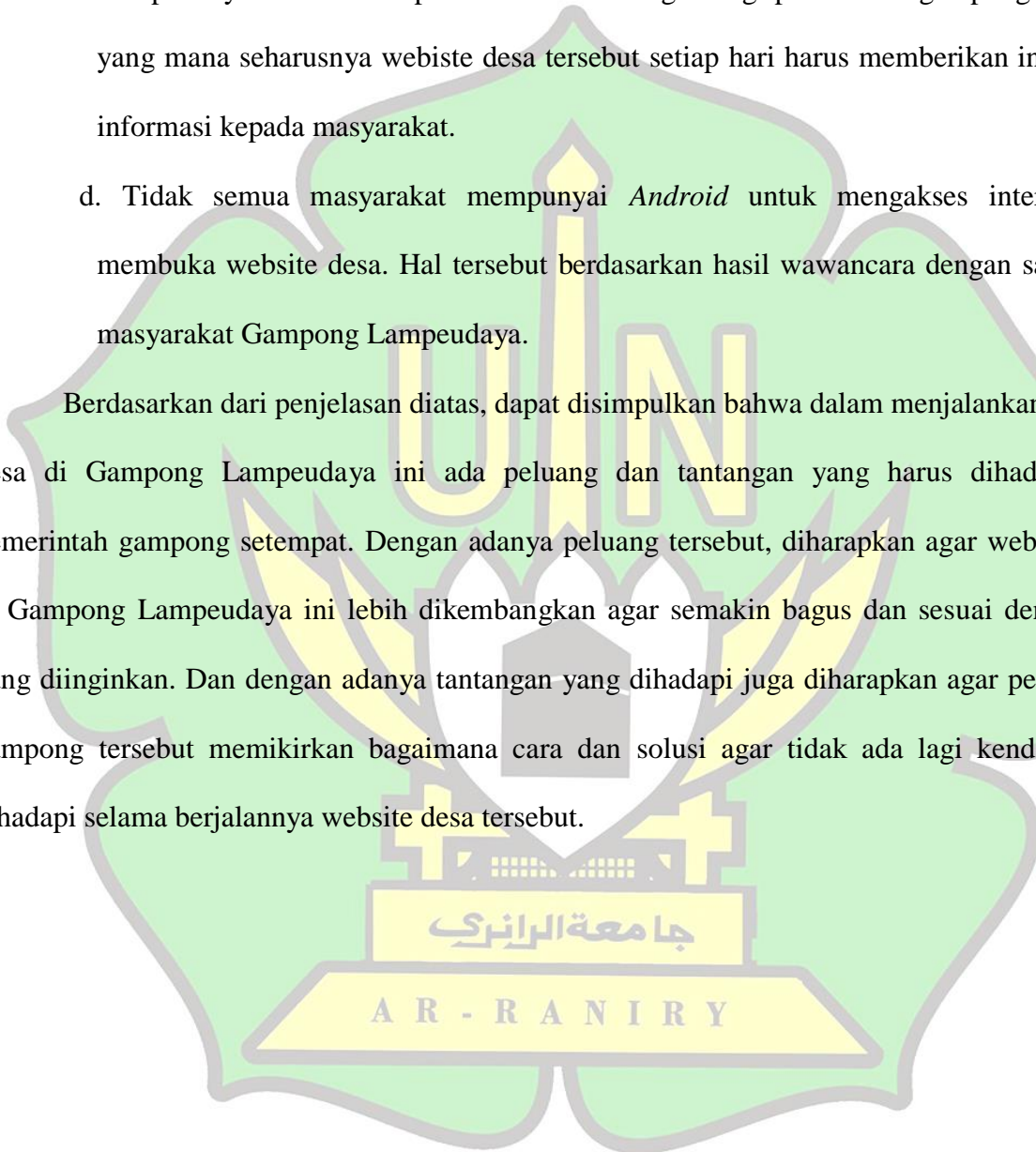
⁴⁹ Hasil wawancara dengan sekretaris gampong Bapak Syarifuddin pada tanggal 12 November 2019

⁵⁰ Hasil wawancara dengan sekretaris gampong Bapak Syarifuddin pada tanggal 12 November 2019

“Masyarakat di Gampong Lampeudaya tidak pernah diberikan sosialisasi secara langsung tentang website desa tersebut. Pengenalan website desa hanya melalui pemasangan spanduk didepan kantor keuchik.”

- c. Minimnya update pemberian informasi-informasi pada website desa Gampong Lampeudaya tersebut merupakan sebuah tantangan bagi pemerintah gampong tersebut, yang mana seharusnya website desa tersebut setiap hari harus memberikan informasi-informasi kepada masyarakat.
- d. Tidak semua masyarakat mempunyai *Android* untuk mengakses internet dan membuka website desa. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Gampong Lampeudaya.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan website desa di Gampong Lampeudaya ini ada peluang dan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah gampong setempat. Dengan adanya peluang tersebut, diharapkan agar website desa di Gampong Lampeudaya ini lebih dikembangkan agar semakin bagus dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan dengan adanya tantangan yang dihadapi juga diharapkan agar pemerintah gampong tersebut memikirkan bagaimana cara dan solusi agar tidak ada lagi kendala yang dihadapi selama berjalannya website desa tersebut.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, website desa di Gampong Lampeudaya ini mulai diberlakukannya pada akhir tahun 2016 dengan tujuan agar gampong tersebut menjadi lebih transparan dalam memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Seperti mengenai sejarah gampong, visi dan misi gampong, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, data mengenai anggaran dana desa dan lain sebagainya. Selain itu, harapan dari pembuatan website desa tersebut adalah agar Gampong Lampeudaya dikenali oleh masyarakat luar.

Kedua, dalam proses pelaksanaan website desa tersebut tentu tidak terlepas dari evaluasi kebijakan, yaitu melihat apakah kebijakan yang dibuat tersebut sudah sesuai atau belum dengan tujuan yang diharapkan. Dalam mengevaluasi suatu kebijakan, terdapat beberapa kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu: (a) Efektivitas. Efektivitas website desa di Gampong Lampeudaya masih belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan masyarakat Gampong Lampeudaya yang mana masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang website desa tersebut. (b) Efisiensi. Efisiensi lebih merujuk pada apakah biaya yang dikeluarkan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Pada website desa, biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran website desa tersebut adalah Rp.900.000/tahun. Akan tetapi dampak yang dirasakan belum maksimal. Dikatakan maksimal apabila seluruh masyarakat mengetahui website desa tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya masih ada masyarakat yang belum mengetahui tentang website desa tersebut. (c) kecukupan. Dalam hal pemberian informasi mengenai data desa, website desa di Gampong Lampeudaya ini sudah

terbilang baik karena sudah sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Desa yang menyatakan bahwa didalam website desa terdapat sejarah desa, visi dan misi desa, anggaran desa, kegiatan desa dan lain sebagainya, walaupun masih perlu adanya perbaikan dalam pemberian informasi mengenai dana desa pada tahun 2018 dan tahun 2019 yang belum dimasukkan kedalam website desa. (d) pemerataan. Di Gampong Lampeudaya pemerataan mengenai website desa belum mencakup seluruh masyarakat Gampong Lampeudaya. Hanya masyarakat yang paham akan dunia teknologi saja yang mengetahui tentang website desa tersebut. Selain itu, juga tidak ada pengenalan atau sosialisasi mengenai website desa tersebut. (e) responsivitas. Responsivitas atau tanggapan masyarakat mengenai website desa sangatlah baik. Walaupun masih adanya masyarakat yang belum mengetahui tentang website desa tersebut, akan tetapi ketika sudah dijelaskan mengenai website desa tersebut, masyarakat sangat berharap dengan adanya website desa tersebut Gampong Lampeudaya ini agar menjadi lebih baik. Dan masyarakat juga mengharapkan adanya pengenalan pembinaan tentang bagaimana cara menggunakan website desa tersebut (f) ketetapan. Ketetapan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program tersebut. Ketetapan juga merujuk pada sudah tepat sasaran atau belumnya kebijakan yang dibuat tersebut. Sasaran dari pembuatan website desa tersebut adalah untuk masyarakat, agar masyarakat mengetahui tentang desa tersebut. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa sasaran dari pembuatan website desa belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Seharusnya sebelum diberlakukannya website desa di Gampong Lampeudaya tersebut, pemerintah gampong melihat dan menilai terlebih dahulu apa dan bagaimana kesiapan di gampong tersebut terhadap perkembangan teknologi dan internet tersebut.

Ketiga, peluang dan tantangan. Adapun peluang dalam website desa di Gampong Lampeudya ini adalah: (a) desa lebih transparan dalam memberikan informasi publik, (b) pemberitahuan mengenai website juga dilakukan melalui grup *WhatsApp* dan (c) aparatur gampong yang mengerti mengenai cara menggunakan dan mengelola website desa. Adapun tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kebijakan website desa tersebut yaitu: (a) tingkat pendidikan masyarakatnya yang rendah, (b) Tidak adanya pendampingan atau penyuluhan mengenai website desa dan dan juga tidak ada pengumuman secara khusus mengenai keberadaan website desa, (c) minimnya update pemberian informasi pada website desa Gampong Lampeudaya tersebut, (d) tidak semua masyarakat mempunyai *Android* untuk mengakses internet dan membuka website desa.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan oleh peneliti yaitu diharapkan kepada aparatur gampong terutama pengelola website desa agar tetap mempertahankan program website desa ini dengan baik dan terus berinovasi dengan harapan website desa ini lebih baik lagi kedepannya dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dan juga diharapkan kepada masyarakat Gampong Lampeudaya agar memberikan dukungan terhadap kebijakan website desa tersebut. Dukungannya yaitu dengan cara mengakses website desa tersebut, memberikan komentar atau saran terhadap website desa tersebut dan juga diharapkan website desa di Gampong Lampeudaya agar segera kembali memberikan informasi-informasi yang sudah terhenti tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Daryanto. 2010. Media Pembelajaran: Peranannya Sangat Penting Dalam Mencapai Tujuan Pembelajaran. Yogyakarta: Gava Media
- Diana Conyer. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar, Terjemahan Susetiawan. Yogyakarta: Gajah mada University Press.
- Dunn, William N, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahann), edisi kedua, Jogyakarta, Gajahmada University Press.
- Dwiningrum, S. I. A.,2012. Ilmu sosial & budaya dasar. Yogyakarta: UNY Press.
- Isbandi Rukminto Adi.2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: Fisip UI Press.
- Jalaluddin Rahmat. 2004. Metode Penelitian Komunikasi, Bandung: Rosdakarya.
- Jamaludin. 2015. Sosiologi Perdesaan. Bandung: Pustaka Setia.
- Keban, Yereimias, T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gaya Media.
- Lexy J. Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mardiasmo, 2001, Desentralisasi Sistem dan Desentralisasi Fiskal, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Mulyana Deddy. Metodologi Pentlian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya .2004.
- Parsons, Wayne, 2011. Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Jakarta, Kencana.
- Prabowo Aji Sumitro, Ramadhan Bara, dkk, 2017. Mengelola Website Desa Menggunakan Aplikasi CMS Wordpress, Pemerintah Kcamatan Pemalang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Program Pusat Pemberdayaan Informatika Dan Desa: Pemalang.
- Slamet, Y. 2004. Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, 2011, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi, Setara Press, Malang.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suharsismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Aneka Cipta.

Soetomo. 2012. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineck Cipta.

R Siti Zuhro, 2009, *Good Governance dan Kinerja Pembangunan Ekonomi Daerah Era Desentralisasi Studi Kasus Kabupaten Malang dalam Demokrasi dan Globalisasi Meretas Jalan Menuju Kejatidirian*, Jakarta: THC Mandiri.

Winarno, Budi. 2013. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*, cetakan pertama, Edisi dan Revisi Terbaru, Yogyakarta. CAPS (Center of academic Publishing Service).

PERUNDANG UNDANGAN

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

JURNAL

Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, dalam Sumarto ST Hetifah. 2004. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Azizaton Nabilah, *Penerapan Website Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang*, 2016, Universitas Negeri Surabaya, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019

Andreas Andoyo, M.T.I., Ahmad Sujarwadi, *Sistem Informasi Berbasis Web Pada Desa Tresnomaju Kecamatan Negerikato, Kabupaten Pesawaran, 2014* STMIK Pringsew, diakses pada tanggal 13 Desember 2018 pada situs <https://ojs.stmikpringsewu.ac.id>.

Andi Arfian, *Analisa Efektivitas dan Kepuasan Pengguna Website Kecamatan Jonggol*, 2017, Program Studi Sistem Informasi STMIK Nusa Mandiri Jakarta, diakses pada tanggal 18 Maret 2019 pada situs www.politeknikmeta.ac.id/meta/ojs/index.php/inkofar/article/.../12.

Darmawi, 2014. *Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program*

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMP) di Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin_Kuning.pdf. Di akses tanggal 13 Desember 2018

Desi Susilowati, Paryanta, *Website Desa Jetis untuk membantu mengelola data penduduk dan dana desa*, 2015, STMIK AUB Surakarta, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.

Herlina, Evi. 2009. *Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (SIM PKB) Di Kota Cimahi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

Muhammad Lukman, *Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Surabaya*, 2015, diakses pada tanggal 19 Maret 2019.

Siska Mulyawati, *Efektivitas Website Desa Sebagai Media Penyebaran Informasi Pembangunan Di Desa Malasari Kabupaten Bogor*. 2016 Sekolah Pascasarjana Insititut Pertanian Bogor, diakses pada tanggal 18 Maret 2019 pada situs <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/82863>

Sulistyowati, Fadjarini dan Rusmala, Candra. 2013. *Partisipasi Warga terhadap Sistem Informasi Desa*. Jurnal Komunikasi. Vol. 2/No. 1/2013 : P. 1-10. Yogyakarta : ASPIKOM.

Suryana, Sawa. 2010. *Buku Ajar Tehnik Pemberdayaan Masyarakat*. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 531/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan,
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK/05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pembenaran Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 12 Desember 2018
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. : Sebagai pembimbing pertama
2. Rizkika Lhena Darwin, MA : Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
Nama : Lena Riani
NIM : 150802029
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Kebijakan Website Desa Terhadap Penyebaran Informasi Pembangunan di Gampong Lampeudaya Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 Februari 2019

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
 4. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax: 0651-7552921
 Homepage: www.uin-araniry.ac.id e-mail: fisip@uin-araniry.ac.id

Nomor : B- 2376-Un.08/FISIP/PP.00.9/11/2019
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

01 November 2019

Kepada Yth,

di -
 Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Lena Riani
 NIM : 150802029
 Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Kebijakan Website Terhadap Penyebaran Informasi Pembangunan Di Gampong Lampeudaya Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar.
 Lokasi Penelitian : Desa Lampeudaya Kec. Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Dekan,

EP&w
 Ernita Dewit



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECAMATAN DARUSSALAM
GAMPONG LAMPEUDAYA**

Website: <http://lampeudaya.web.id> - KODE POS 23373

SURAT KETERANGAN

Nomor : 227 /2002/XI/2019

Keuchik Gampong Lampeudaya Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lena Riani
 Nim : 150802029
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry
 Judul : Kebijakan Website Desa Terhadap Penyebaran Informasi
 Pembangunan di Gampong Lampeudaya
 Kecamatan Darussalam Kab.Aceh Besar
 Lokasi : Gampong Lampeudaya

Benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di gampong Lampeudaya kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar selama 14 hari.

Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan dengan sebenarnya dan dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 25 November 2019

Keuchik

Fauzan

A R - R A N I R Y

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana kebijakan penggunaan website desa di Gampong Lampeudaya berpengaruh terhadap penyebaran informasi pembangunan ?
 - a. Apakah masyarakat mengetahui jika di gampong ini sudah mempunyai website desa ?
 - b. Apakah masyarakat memerlukan website desa ini sebagai media penyebaran informasi ke masyarakat ?
 - c. Apakah selama ini Bapak/Ibu mengakses website desa tersebut ?
 - d. Apa saja data yang sering diakses oleh masyarakat ketika mengakses website desa ?
 - e. Apa tujuan/harapan adanya website desa tersebut ?
 - f. Setelah adanya website desa, apakah tujuan awal perencanaan tersebut tercapai ?
 - g. Adakah masalah dalam pembangunan desa dimudahkan karena kehadiran website desa ?
 - h. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan website desa ?
 - i. Apakah setelah dikeluarkan biaya tersebut, gampong mendapat manfaat yang lebih besar dari website desa itu ?
 - j. Apakah kehadiran website desa memenuhi/memuaskan kebutuhan aparatur gampong dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik ?
 - k. Apakah kehadiran website desa memenuhi/memuaskan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik ?
 - l. Apakah seluruh masyarakat dapat mengakses website ? Bila iya, bagaimana ? Bila tidak, mengapa ?

- m. Bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan website desa ?
 - n. Apakah website desa menjadi solusi untuk perencanaan pembangunan dan pelayanan publik ? bila iya mengapa dan bagaimana ? bila tidak mengapa dan bagaimana ?
2. Apa peluang dan tantangan pemerintah Gampong Lampeudaya dalam mengimplementasikan kebijakan penggunaan website desa terhadap penyebaran informasi pembangunan ?
- a. Apa yang menjadi landasan untuk memutuskan membuat website desa di gampong ini ?
 - b. Apa saja tantangan yang dihadapi selama adanya website desa tersebut ?
 - c. Bagaimana tingkat pendidikan masyarakat di gampong ini ?
 - d. Apakah masyarakat pernah disosialisasikan tentang website desa tentang website desa oleh aparatur gampong ?



DOKUMENTASI

Foto kantor keuchik Gampong Lampeudaya



Foto wawancara bersama Keuchik Gampong Lampeudaya



Foto wawancara bersama masyarakat Gampong Lampeudaya



Foto wawancara bersama sekretaris desa Gampong Lampeudaya



Foto wawancara bersama masyarakat Gampong Lampeudaya



Foto wawancara bersama masyarakat Gampong Lampeudaya



Foto wawancara bersama masyarakat Gampong Lampeudaya



Foto wawancara bersama masyarakat Gampong Lampeudaya

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y